



LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PT BPR BINTAN (PERSERODA)

2025

BERSATU KITA TUMBUH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
VISI DAN MISI, NILAI-NILAI BUDAYA DAN MOTTO PERUSAHAAN	4
INFORMASI UMUM	5
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN	38
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	45

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, PT Bank Perekonomian Rakyat Bintang (Perseroda) dapat menyajikan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan gambaran menyeluruh mengenai kinerja serta pencapaian perusahaan sepanjang tahun tersebut.

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh makna bagi BPR Bintang. Kami terus berkomitmen pada visi untuk menjadi bank yang berperan aktif dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui pelayanan profesional. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kinerja keuangan yang positif, di mana total aset perusahaan per 31 Desember 2025 mencapai Rp272.201.661.307, atau meningkat sebesar 5,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran kredit juga mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 17,67% sebagai bentuk dukungan nyata kami terhadap geliat ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bintang.

Dalam menghadapi era digitalisasi, manajemen telah mengambil langkah strategis melalui pengembangan layanan perbankan berbasis teknologi, seperti aplikasi **BiSmart** dan **BiEasy** (e-wallet). Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan nasabah, khususnya bagi masyarakat luas dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di wilayah operasional kami.

Laporan ini juga menandai tonggak sejarah penting dengan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Terbatas dengan nama **PT Bank Perekonomian Rakyat Bintang (Perseroda)** yang ditetapkan pada awal tahun 2026. Transformasi ini adalah bagian dari upaya penguatan tata kelola perusahaan yang lebih modern dan kompetitif.

KATA PENGANTAR

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Bintang selaku pemilik modal atas dukungan yang berkelanjutan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh nasabah setia, mitra kerja, serta seluruh jajaran karyawan atas dedikasi dan kerja sama yang solid sesuai dengan motto kita, **"Bersatu Kita Tumbuh"**.

Semoga laporan ini memberikan manfaat dan gambaran yang jelas mengenai langkah kami dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Bintan, Maret 2026

Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Bintang (Perseroda)

VISI DAN MISI, NILAI-NILAI BUDAYA DAN MOTTO PERUSAHAAN

VISI

Menjadi bank yang dapat berperan dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan dan berdaya saing dengan memberikan pelayanan secara profesional.

MISI

1. Memberikan pelayanan perbankan ke seluruh lapisan masyarakat.
2. Sebagai pembina, pengembang, dan pendamping dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, pengusaha kecil, dan koperasi.
3. Mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan keuangan melalui lembaga perbankan.
4. Ikut berperan sebagai pengelola keuangan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
5. Mengelola bank secara transparan, efisien, dan akurat.

NILAI-NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

1. Kejujuran

Memegang teguh integritas dalam menjalankan tugas perusahaan.

2. Bertanggung jawab

Selalu bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil.

3. Kerja sama

Selalu menjalin kerja sama yang positif sesama pegawai dan saling bantu membantu.

4. Profesionalisme

Selalu menjalankan tugas-tugas perusahaan yang berdasarkan norma-norma, peraturan perusahaan dan etika perbankan.

MOTTO

“Bersatu Kita Tumbuh”

Dengan bersatunya masyarakat dan pemerintah daerah melalui lembaga intermediasi yaitu BPR Bintang maka akan menumbuhkan kembangkan perekonomian masyarakat.

INFORMASI UMUM

Kepengurusan

Susunan pengurus **Bank Perekonomian Rakyat Bintan** ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Daerah selaku pemilik modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 261/V/2019 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan Periode 2024–2029**, Direksi diberikan mandat untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usaha BPR secara profesional dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Sementara itu, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dilaksanakan oleh **Dewan Pengawas**, yang diangkat berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 447/X/2021 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan Periode Tahun 2021–2025** serta **Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 114/I/2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas BPR Bintan Periode Tahun 2024–2028**.

Dengan demikian, berdasarkan keputusan-keputusan tersebut, susunan pengurus **BPR Bintan per 31 Desember 2025** adalah sebagai berikut:

Komisaris

Nama	Johnson Pasaribu
Alamat	Jl Batu Kenanga No 14 Jakarta Timur
Jabatan	Komisaris Utama
Tanggal Mulai Menjabat	27 Oktober 2021
Tanggal Selesai Menjabat	27 Oktober 2025
Nomor SK Persetujuan Otoritas	447/X/2021

INFORMASI UMUM

Tanggal SK Persetujuan Otoritas	27 Oktober 2021
Pendidikan Terakhir	S1
Tanggal Kelulusan	25 November 1988
Nama Lembaga Pendidikan	Universitas HKBP Nommensen Medan
Pendidikan Non Formal Terakhir	Komisaris
Tanggal Pelatihan	08 Desember 2020
Lembaga Penyelenggara	Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro Certif
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	25 November 2028

Nama	Ronny Kartika
Alamat	Jl Batu Kucing No 10 RT 005 RW 003 Tanjungpinang
Jabatan	Komisaris
Tanggal Mulai Menjabat	26 Januari 2024
Tanggal Selesai Menjabat	26 Januari 2028
Nomor SK Persetujuan Otoritas	KEP-5/KO.1501/2024
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	10 Januari 2024

INFORMASI UMUM

Pendidikan Terakhir	S2
Tanggal Kelulusan	07 Oktober 2019
Nama Lembaga Pendidikan	Universitas Batam
Pendidikan Non Formal Terakhir	Komisaris
Tanggal Pelatihan	26 Oktober 2023
Lembaga Penyelenggara	Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro Certif
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	29 September 2028

Direksi

Nama	Radhiah
Alamat	Jl Bunguran No 50 Perumnas Sei Jang Tanjungpinang
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal Mulai Menjabat	3 Mei 2024
Tanggal Selesai Menjabat	3 Mei 2029
Nomor SK Persetujuan Otoritas	276/V/2024
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	3 Mei 2024

INFORMASI UMUM

Pendidikan Terakhir	S1
Tanggal Kelulusan	31 Desember 1993
Nama Lembaga Pendidikan	Universitas Riau
Pendidikan Non Formal Terakhir	Direktur Tingkat 2
Tanggal Pelatihan	20 Mei 2021
Lembaga Penyelenggara	Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro Certif
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	20 Mei 2026
Nama	Siti Harlisah, SE
Alamat	Jl Hutan Lindung No 18 Tanjungpinang
Jabatan	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Tanggal Mulai Menjabat	03 Mei 2024
Tanggal Selesai Menjabat	03 Mei 2029
Nomor SK Persetujuan Otoritas	276/V/2024
Tanggal SK Persetujuan Otoritas	03 Mei 2024
Pendidikan Terakhir	S1
Tanggal Kelulusan	31 Desember 1998

INFORMASI UMUM

Nama Lembaga Pendidikan	Universitas Riau
Pendidikan Non Formal Terakhir	Direktur Tingkat 2
Tanggal Pelatihan	05 September 2023
Lembaga Penyelenggara	Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro Certif
Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Yang Berlaku	Ya
Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	05 September 2028

Pejabat Eksekutif

DATA	KETERANGAN
Nama	HARU MENO FARHAN
Alamat	Perum Kijang Kencana II Blok A No 17 RT 003 RW 001 Tanjungpinang
Jabatan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT
Tanggal Mulai Menjabat	01 Maret 2019
Surat Pengangkatan Nomor	519/SK-DIR/III/2019
Surat Pengangkatan Tanggal	01 Maret 2019

INFORMASI UMUM

DATA	KETERANGAN
Nama	SUHARDI
Alamat	Jalan Tanjung Uban KM 39 Kangboi RT 004 RW 002 Bintan
Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
Tanggal Mulai Menjabat	12 Oktober 2022
Surat Pengangkatan Nomor	794
Surat Pengangkatan Tanggal	12 Oktober 2022

DATA	KETERANGAN
Nama	NITA DWI KURNIATI
Alamat	Jl Martosari Gang Nurul Haq RT 003 RW 002 Kel Tanjung Uban Selatan, Binut
Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
Tanggal Mulai Menjabat	21 November 2011
Surat Pengangkatan Nomor	93
Surat Pengangkatan Tanggal	21 November 2011

DATA	KETERANGAN
Nama	RIAVIKA SONI AGRIANI
Alamat	Jl Imam Bonjol RT 003 RW 001 Tanjung Uban Bintan

INFORMASI UMUM

Jabatan	Pejabat Eksekutif Audit Intern
Tanggal Mulai Menjabat	01 Maret 2019
Surat Pengangkatan Nomor	520/SK-Dir/III/2019
Surat Pengangkatan Tanggal	01 Maret 2019

DATA	KETERANGAN
Nama	GULINGAN
Alamat	Perum Telaga Surya Regency Gang Sepat No E 14 RT 003 RW 006 Tg Uban Utara, Binut
Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
Tanggal Mulai Menjabat	03 Maret 2017
Surat Pengangkatan Nomor	359
Surat Pengangkatan Tanggal	03 Maret 2017

Kepemilikan

DATA	KETERANGAN
Nama	PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
Alamat	Bintan
Jenis Pemilik	Pemerintah Daerah

INFORMASI UMUM

Status Pemegang Saham	PSP
Jumlah Nominal	Rp20.000.000.000,00
Persentase Kepemilikan	100%

Perkembangan Usaha

Sejarah Perusahaan

INFORMASI	KETERANGAN
Nomor Akta Pendirian	5 Tahun 2005
Tanggal Akta Pendirian	24 Oktober 2005
Nomor Perubahan Anggaran Dasar Terakhir	1
Tanggal Perubahan Anggaran Dasar Terakhir	07 Januari 2026
Nomor Pengesahan Dari Instansi Yang Berwenang	AHU-0001234.AH.01.01.TAHUN 2026
Tanggal Pengesahan Dari Instansi Yang Berwenang	08 Januari 2026
Bidang Usaha Sesuai Anggaran Dasar	Perbankan
Tempat Kedudukan	Bintan

PT Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda) merupakan lembaga keuangan milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang didirikan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pembentukan BPR Bintan diawali dengan diterbitkannya **Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 24 Oktober 2005** tentang Pembentukan

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan. Peraturan tersebut kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan, antara lain melalui **Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007** tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005. Selanjutnya, dilakukan perubahan kembali melalui **Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2010** serta **Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2013** sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan operasional BPR.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan tersebut, **PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan** memperoleh **Persetujuan Prinsip Pendirian** dari Bank Indonesia berdasarkan **Surat Nomor 9/29/DPBPR tanggal 19 Januari 2007**. Setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, BPR Bintan secara resmi memperoleh **Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat dari Gubernur Bank Indonesia** melalui **Keputusan Nomor 10/6/KEP.GBI/DPG/2008** tentang Pemberian Izin Usaha PD Bank Perkreditan Rakyat Bintan, yang kemudian diperkuat dengan **Surat Pemberitahuan Bank Indonesia Nomor 10/27/DPBPR/IDBPR/Btm**. BPR Bintan mulai beroperasi secara resmi pada **25 Februari 2008** dengan kantor yang berlokasi di **Jalan Permaisuri, Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau**.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan usaha BPR, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan penambahan penyertaan modal yang diatur melalui **Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2013** tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan serta **Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2018** tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan.

Seiring dengan perkembangan regulasi terkait Badan Usaha Milik Daerah, status kelembagaan BPR Bintan mengalami perubahan dari **Perusahaan Daerah (PD)** menjadi **Perusahaan Umum Daerah (Perumda)** berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019** tentang **Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan**. Ketentuan tersebut kemudian diperbarui kembali melalui **Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2021** guna menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penguatan tata kelola perusahaan.

Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya transformasi kelembagaan dan peningkatan tata kelola perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bentuk badan hukum BPR Bintan

kembali mengalami perubahan dari **Perusahaan Umum Daerah (Perumda)** menjadi **Perseroan Terbatas** dengan nama **PT Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda)**. Perubahan bentuk badan hukum tersebut ditetapkan berdasarkan **Akta Notaris Nomor 1 tanggal 7 Januari 2026**.

Hingga saat ini, **PT Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda)** terus berkomitmen untuk menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan daerah yang profesional, sehat, dan terpercaya, dengan fokus pada pelayanan kepada masyarakat serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Timeline Sejarah BPR Bintan (2005–2026)

2005

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau menetapkan **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 24 Oktober 2005** tentang Pembentukan **Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan** sebagai lembaga keuangan daerah yang bertujuan mendukung perekonomian masyarakat.

2007

Diterbitkan **Persetujuan Prinsip Pendirian PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan** dari Bank Indonesia melalui **Surat Nomor 9/29/DPBPR tanggal 19 Januari 2007**. Pada tahun yang sama dilakukan perubahan regulasi melalui **Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 18 Juni 2007** tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005.

2008

PD BPR Bintan memperoleh **Izin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia** melalui **Keputusan Nomor 10/6/KEP.GBI/DPG/2008** serta **Surat Pemberitahuan Bank Indonesia Nomor 10/27/DPBPR/IDBPR/Btm**.

BPR Bintan secara resmi **memulai operasional pada 25 Februari 2008** dengan kantor yang berlokasi di **Jl. Permaisuri, Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau**.

2010

Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan **Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010** tentang

INFORMASI UMUM

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 sebagai upaya penyempurnaan regulasi dan penguatan kelembagaan BPR.

2013

Ditetapkan **Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2013** tentang **Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005**. Pada tahun yang sama, Pemerintah Kabupaten Bintan juga melakukan **penambahan penyertaan modal** melalui **Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013**.

2018

Pemerintah Kabupaten Bintan kembali memperkuat permodalan BPR melalui **Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2018** tentang **Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan**.

2019

Berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019**, status kelembagaan berubah dari **Perusahaan Daerah (PD)** menjadi **Perusahaan Umum Daerah (Perumda)** dengan nama **Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan**.

2021

Dilakukan pembaruan regulasi melalui **Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2021** tentang **Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan** guna menyesuaikan dengan perkembangan regulasi BUMD dan tata kelola perusahaan.

2026

BPR Bintan melakukan transformasi bentuk badan hukum dari **Perusahaan Umum Daerah (Perumda)** menjadi **Perseroan Terbatas** dengan nama **PT Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda)** berdasarkan **Akta Notaris Nomor 1 tanggal 7 Januari 2026**.

Hasil Audit Akuntan Publik

Opini Akuntan Publik	01 Wajar Tanpa Pengecualian
Nama Akuntan Publik	Indarto dan Yudhika

INFORMASI UMUM

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Nama Rekening	Jumlah
Pendapatan Operasional	28.659.066.008
Beban Operasional	22.383.291.909
Pendapatan Non Operasional	11.281.833
Beban Non Operasional	136.559.672
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	6.150.496.260
Taksiran Pajak Penghasilan	1.313.770.302
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	4.836.725.958

Rasio Keuangan

Rasio Keuangan	Nilai Rasio (%)
Kewajiban Penyertaan Modal Minimum (KPMM)	30,13
Rasio Cadangan terhadap PPKA	85,95
Non Performing Loan (NPL) Neto	3,98
Non Performing Loan (NPL) Gross	5,75
Return On Assets (ROA)	2,34
Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	78,10
Loan To Deposit Ratio (LDR)	102,43
Cash Ratio	11,26

Penjelasan Mengenai NPL Termasuk Penyebab Utama NPL

Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas aset produktif dan tingkat kesehatan bank. NPL mencerminkan tingkat kredit bermasalah yang terdiri dari kredit dengan kolektibilitas **kurang lancar, diragukan, dan macet** dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan oleh bank.

Selama periode pelaporan, manajemen **BPR Bintang** senantiasa melakukan pemantauan terhadap kualitas portofolio kredit guna memastikan pengelolaan risiko kredit tetap berada dalam batas yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan regulator. Proses pengawasan terhadap kredit dilakukan secara berkelanjutan melalui monitoring terhadap kemampuan pembayaran debitur serta perkembangan usaha yang dijalankan oleh debitur.

Berdasarkan hasil evaluasi internal, **penyebab utama terjadinya kredit bermasalah pada periode laporan adalah menurunnya omzet usaha debitur**, yang berdampak pada kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit. Penurunan omzet tersebut umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain menurunnya aktivitas usaha, persaingan usaha yang semakin ketat, serta kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

Akibat penurunan omzet tersebut, sebagian debitur mengalami tekanan pada arus kas usaha sehingga kewajiban pembayaran kredit tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah tersebut, BPR Bintang melakukan berbagai langkah penanganan secara persuasif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu langkah penyelesaian yang dilakukan adalah **melalui penjualan agunan yang telah diserahkan oleh debitur kepada bank sebagai jaminan kredit**. Selain itu, dalam beberapa kasus debitur juga melakukan **penjualan aset lainnya secara sukarela** guna melunasi kewajiban kredit kepada bank.

Pendekatan penyelesaian ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, musyawarah, serta mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun debitur. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan secara efektif sehingga dapat menjaga kualitas aset produktif bank serta mendukung keberlanjutan operasional BPR Bintang.

Ke depan, manajemen BPR Bintang akan terus memperkuat proses analisis kredit, pemantauan usaha debitur, serta pembinaan kepada nasabah guna meminimalkan potensi terjadinya kredit bermasalah dan menjaga pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan.

Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap BPR

Pada periode laporan tahun buku **2025**, **BPR Bintang** tidak mengalami perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Selama periode tersebut, tidak terdapat penambahan maupun pengurangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR Bintang. Selain itu, tidak terdapat perubahan terkait jaringan kantor maupun penyesuaian struktur operasional yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha bank.

Kegiatan operasional BPR Bintang selama tahun 2025 tetap berjalan sebagaimana kegiatan usaha yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan fokus pada penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Selanjutnya, selama periode laporan juga **tidak terdapat perubahan penting lainnya** yang mempengaruhi kinerja maupun operasional BPR Bintang, baik yang berasal dari faktor internal perusahaan maupun dari kelompok usaha BPR. BPR Bintang tetap menjalankan kegiatan usaha secara normal dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian serta kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Dengan demikian, sepanjang tahun buku **2025 tidak terdapat perubahan signifikan maupun perubahan penting lainnya** yang berdampak terhadap kegiatan usaha, kinerja, maupun operasional BPR Bintang.

Strategi Dan Kebijakan Manajemen

Strategi Pengembangan Bisnis Di Era Digital

Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, **BPR Bintang** terus melakukan upaya pengembangan layanan berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah serta memperluas jangkauan layanan perbankan.

Salah satu strategi pengembangan bisnis di era digital yang dilakukan oleh BPR Bintang adalah melalui penyediaan layanan aplikasi digital **BiSmart** dan **BiEasy (e-wallet)**. Kedua layanan tersebut dikembangkan sebagai sarana untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam melakukan transaksi keuangan bagi nasabah BPR Bintang.

Aplikasi **BiSmart** merupakan layanan digital yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi terkait produk dan layanan BPR serta melakukan berbagai aktivitas perbankan secara lebih praktis. Sementara itu, **BiEasy (e-wallet)** merupakan layanan dompet elektronik yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi keuangan secara digital, khususnya bagi nasabah yang membutuhkan kemudahan dalam melakukan pembayaran maupun transaksi keuangan lainnya.

Pengembangan layanan digital tersebut juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan transaksi keuangan bagi **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)** di wilayah **Kabupaten Bintang**, yang menjadi salah satu segmen nasabah potensial bagi BPR Bintang. Melalui layanan **BiSmart** dan **BiEasy**, nasabah P3K dapat melakukan transaksi keuangan secara lebih efisien tanpa harus selalu datang langsung ke kantor bank.

Dengan adanya layanan digital ini, BPR Bintang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, memperluas akses layanan keuangan, serta meningkatkan daya saing BPR dalam menghadapi perkembangan industri jasa keuangan yang semakin berbasis teknologi.

Ke depan, manajemen BPR Bintang akan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan layanan digital guna mendukung transformasi digital di sektor perbankan serta memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada nasabah tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Penguatan Permodalan

Permodalan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan usaha serta meningkatkan kapasitas intermediasi Bank Perekonomian Rakyat. Dalam rangka menjaga tingkat permodalan yang sehat dan memadai, **BPR Bintan** senantiasa melakukan pengelolaan permodalan secara prudent dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan usaha, tingkat risiko yang dihadapi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama periode laporan tahun buku **2025, tidak terdapat penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bintan selaku pemilik modal**. Meskipun demikian, manajemen BPR Bintan tetap berkomitmen untuk menjaga struktur permodalan yang kuat melalui pengelolaan kinerja keuangan yang sehat serta optimalisasi laba perusahaan sebagai sumber penguatan modal internal.

Strategi penguatan permodalan yang dilakukan BPR Bintan antara lain dengan meningkatkan kinerja operasional melalui pengelolaan portofolio kredit yang berkualitas, peningkatan efisiensi operasional, serta pengendalian risiko yang efektif sehingga mampu menghasilkan kinerja keuangan yang positif dan berkelanjutan.

Selain itu, BPR Bintan juga terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan permodalan sejalan dengan rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang. Apabila diperlukan, penambahan modal dapat dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal dari pemilik modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan strategi tersebut, BPR Bintan diharapkan tetap mampu menjaga tingkat permodalan yang memadai guna mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat peran BPR dalam mendukung perekonomian daerah.

Strategi Untuk Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Dan Tata Kelola

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, **BPR Bintan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*)** guna meminimalisir berbagai risiko yang berpotensi timbul dan dapat berdampak terhadap kinerja maupun keberlangsungan usaha bank.

Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko, BPR Bintan secara berkelanjutan melakukan **identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko** pada seluruh aktivitas

operasional bank. Pengelolaan risiko tersebut diterapkan pada beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR Bintang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam rangka meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, BPR Bintang menerapkan beberapa kebijakan antara lain:

- a. Melakukan **analisis kredit secara cermat dan komprehensif** serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit.
- b. Memanfaatkan **Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)** untuk memperoleh informasi mengenai karakter dan riwayat kredit calon debitur.
- c. Melakukan **pengikatan jaminan secara notariil**, khususnya bagi kredit yang dijamin dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan.
- d. Melakukan **pemantauan dan pembinaan secara berkala terhadap debitur** guna memastikan kelancaran pembayaran kewajiban kredit.
- e. Menyempurnakan sistem analisis kredit, termasuk penerapan **rasio kemampuan pembayaran angsuran terhadap pendapatan debitur** sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian kredit.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas maupun dari aset likuid yang dimiliki.

Dalam rangka menjaga kondisi likuiditas yang sehat, BPR Bintang melakukan **pemantauan dan pengendalian likuiditas secara harian**, baik untuk memenuhi kebutuhan penyaluran kredit maupun untuk mendukung kegiatan operasional lainnya. Pengelolaan likuiditas dilakukan dengan memastikan ketersediaan dana yang memadai sehingga bank tetap mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya secara tepat waktu.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, maupun akibat kejadian eksternal.

Untuk meminimalisir risiko operasional, BPR Bintang menerapkan beberapa kebijakan antara lain:

- a. Menerapkan **pembatasan kewenangan transaksi pada teller secara berjenjang**.
- b. Melaksanakan **pengendalian ganda (*dual control*)** dalam setiap proses transaksi.
- c. Memperkuat **fungsi pengawasan internal** untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Menyelenggarakan **program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai** secara berkala guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang timbul akibat adanya kelemahan aspek hukum yang dapat menimbulkan tuntutan hukum terhadap bank.

Dalam rangka memitigasi risiko hukum, BPR Bintang menerapkan beberapa kebijakan antara lain:

- a. Melakukan **pengikatan kerja sama secara formal melalui Nota Kesepakatan, Memorandum of Understanding (MoU), atau Perjanjian Kerja Sama** pada setiap kerja sama dengan pihak ketiga.
- b. Mengikutsertakan pegawai dalam **pelatihan terkait aspek hukum, operasional perbankan, serta pengelolaan risiko hukum** guna meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku.

5. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

Dalam rangka menjaga reputasi dan citra perusahaan, BPR Bintang senantiasa berupaya menjaga kualitas pelayanan kepada nasabah serta membangun komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, BPR Bintang juga memanfaatkan berbagai

media komunikasi untuk menjaga dan meningkatkan citra positif perusahaan di tengah masyarakat.

6. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat BPR tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku.

Dalam rangka meminimalisir risiko kepatuhan, BPR Bintang menerapkan beberapa langkah antara lain:

- a. Menjaga **konsistensi dalam implementasi seluruh kebijakan dan prosedur operasional** pada seluruh jajaran Direksi dan pegawai secara berkesinambungan.
- b. Memprioritaskan **tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dari otoritas pengawas**, baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan, serta memastikan penerapan regulasi dan ketentuan baru secara tepat waktu.

Melalui penerapan strategi manajemen risiko yang terintegrasi serta penguatan tata kelola perusahaan yang baik, BPR Bintang berkomitmen untuk menjaga stabilitas operasional bank, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Strategi Pemasaran

Sepanjang tahun **2025**, **BPR Bintang** terus melakukan berbagai upaya pemasaran guna meningkatkan pertumbuhan bisnis serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah **Kabupaten Bintang dan sekitarnya**. Strategi pemasaran yang diterapkan difokuskan pada peningkatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit yang berkualitas, serta penguatan hubungan dengan nasabah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut, BPR Bintang menerapkan beberapa strategi pemasaran antara lain melalui **pendekatan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha**, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi dan komunitas di wilayah operasional BPR. Pendekatan ini dilakukan untuk memperkenalkan produk dan layanan BPR Bintang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan yang disediakan.

Selain itu, BPR Bintang juga melakukan **kegiatan promosi dan sosialisasi produk secara aktif**, baik melalui kegiatan kunjungan langsung (direct marketing) maupun melalui media komunikasi yang tersedia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat

INFORMASI UMUM

mengenai berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh BPR Bintang, termasuk produk simpanan, kredit, serta layanan digital yang dimiliki oleh BPR.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih praktis, strategi pemasaran juga didukung dengan **pemanfaatan layanan digital yang dimiliki BPR Bintang**, seperti aplikasi **BiSmart** dan **BiEasy (e-wallet)**, yang ditujukan untuk memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah, khususnya bagi **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)** di wilayah Kabupaten Bintang.

Melalui berbagai strategi pemasaran tersebut, BPR Bintang berupaya untuk terus meningkatkan jumlah nasabah, memperluas basis pasar, serta memperkuat posisi BPR sebagai lembaga keuangan yang terpercaya bagi masyarakat. Ke depan, BPR Bintang akan terus mengembangkan strategi pemasaran yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat serta dinamika industri jasa keuangan.

Arah Kebijakan Dalam Penguatan Usaha BPR

Dalam rangka mendukung penguatan usaha serta menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan, **BPR Bintang** telah menetapkan arah kebijakan strategis yang tertuang dalam **Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025**. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing BPR di tengah perkembangan industri jasa keuangan yang semakin dinamis serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, mudah, dan berbasis teknologi.

Arah kebijakan BPR dalam pengembangan bisnis di era digital menitikberatkan pada **inovasi serta integrasi teknologi informasi** guna meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Dalam implementasinya, BPR Bintang berfokus pada **pengembangan layanan aplikasi digital** yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang **user-friendly**, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses berbagai layanan perbankan secara lebih praktis dan efisien.

Selain itu, BPR Bintang juga memperkuat penerapan **sistem keamanan siber (cyber security)** sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap data dan transaksi nasabah. Penerapan sistem keamanan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas layanan digital yang disediakan oleh BPR tetap aman, andal, dan terpercaya.

INFORMASI UMUM

Dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal serta perkembangan industri keuangan yang semakin cepat, BPR Bintang juga menerapkan strategi adaptif melalui **pemantauan secara berkelanjutan terhadap perkembangan regulasi di sektor jasa keuangan**, penyesuaian terhadap **tren digitalisasi perbankan**, serta penguatan kerja sama dengan **Pemerintah Daerah** sebagai pemilik modal.

Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah juga diarahkan untuk mendukung pengembangan layanan keuangan yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas, khususnya dalam memberikan solusi pembiayaan yang cepat dan tepat bagi **pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)** di wilayah Kabupaten Bintang.

Melalui arah kebijakan tersebut, BPR Bintang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat posisi sebagai lembaga keuangan daerah yang terpercaya, serta tetap **responsif dan kompetitif dalam menghadapi dinamika perkembangan pasar dan kebutuhan nasabah di era digital**.

dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPR Bintang menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pelaku usaha, serta berbagai segmen nasabah di wilayah operasional BPR.

1. Produk Simpanan

BPR Bintang menyediakan berbagai produk simpanan dalam bentuk tabungan yang memberikan kemudahan, keamanan, serta manfaat bagi nasabah dalam mengelola keuangannya. Produk tabungan yang dimiliki BPR Bintang antara lain:

- a. Tabungan Dana Plus
- b. Tabungan Dana Bintang
- c. TabunganKu
- d. Tabungan Dana Plus Perusahaan
- e. Tabungan Sejahtera Bintang
- f. Tabungan Masyarakat
- g. B-Save
- h. Simpanan Pelajar (SIMPEL)
- i. Tabungan Dana Pro
- j. Tabungan Berkah
- k. Dana Plus PDRS
- l. Tabungan Mikro Bangkit
- m. Tabungan Dana Prima
- n. Tabungan Simpanan Arisan Masyarakat
- o. Tabungan Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)
- p. Tabungan Antar Bank
- q. Tabungan Prima Flexi
- r. Tabungan Bintara (Bintang Juara)

Produk-produk tabungan tersebut dirancang untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat, mulai dari pelajar, individu, pelaku usaha, hingga lembaga atau perusahaan.

2. Produk Deposito

Selain produk tabungan, BPR Bintang juga menyediakan produk **Deposito Prima Bintang** sebagai sarana investasi yang aman bagi masyarakat dengan pilihan jangka waktu **1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan**. Produk deposito ini memberikan alternatif bagi nasabah yang ingin memperoleh imbal hasil yang kompetitif dengan tingkat keamanan yang terjamin.

3. Produk Kredit

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha, BPR Bintang juga menyalurkan berbagai jenis kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Produk kredit yang disediakan oleh BPR Bintang antara lain:

- a. Kredit KETAN (Kredit Potong Gaji)
- b. Kredit Serba Guna
- c. Kredit Pemilikan Rumah
- d. Kredit Pemilikan Kendaraan
- e. Kredit Modal Kerja
- f. Kredit Mikro Bakulan
- g. Kredit PRS
- h. Kredit Investasi
- i. Kredit Sindikasi
- j. Kredit Mikro Bangkit (KMB)
- k. Kredit P2P
- l. Kredit kepada Lembaga Keuangan (KMCLK)

Melalui berbagai produk kredit tersebut, BPR Bintang berupaya memberikan dukungan pembiayaan kepada masyarakat, khususnya bagi **pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)**, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan ragam produk simpanan dan kredit yang dimiliki, BPR Bintang berkomitmen untuk terus memberikan layanan perbankan yang **mudah diakses, aman, serta memberikan manfaat bagi masyarakat**, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Bintang dan sekitarnya.

Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung kelancaran operasional serta meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, **BPR Bintan** terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari strategi penguatan layanan perbankan. Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses layanan, serta mendukung pengembangan produk dan layanan perbankan yang lebih inovatif.

Dalam penyelenggaraan teknologi informasi, BPR Bintan bekerja sama dengan beberapa **Penyelenggara Jasa Teknologi Informasi (PJTI)** yang memiliki kompetensi di bidangnya. Untuk pengelolaan **aplikasi core banking system**, BPR Bintan bekerja sama dengan **PT Gurindam Fajar Sinergi**, yang menyediakan sistem inti perbankan yang digunakan dalam mendukung seluruh aktivitas operasional bank.

Sistem yang digunakan oleh BPR Bintan dalam mendukung pengelolaan transaksi perbankan adalah **Core Banking System SLAIS DNAW**, yang berfungsi sebagai sistem utama dalam pengelolaan data transaksi nasabah, pencatatan aktivitas keuangan, serta pengelolaan berbagai produk dan layanan perbankan secara terintegrasi.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya transformasi digital dan peningkatan layanan kepada nasabah, BPR Bintan juga mengembangkan layanan digital melalui aplikasi **BiSmart** dan **BiEasy**. Pengembangan aplikasi **BiSmart** dilakukan melalui kerja sama dengan **PT Interaksi Karya Nusantara**, yang menyediakan platform layanan digital untuk memudahkan nasabah dalam mengakses informasi serta berbagai layanan perbankan secara lebih praktis.

Sementara itu, untuk layanan **BiEasy** yang merupakan aplikasi dompet elektronik (e-wallet), BPR Bintan bekerja sama dengan **PT Bimasakti Multi Sinergi**. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan secara digital, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi.

Upaya digitalisasi tersebut merupakan bagian dari komitmen BPR Bintan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di industri jasa keuangan.

Dalam rangka menjaga keamanan dan keandalan sistem teknologi informasi, BPR Bintan juga menerapkan berbagai langkah pengamanan yang meliputi penyusunan **Standar Operasional**

Prosedur (SOP) terkait pengelolaan teknologi informasi, penerbitan **memorandum internal** yang mengatur penggunaan sistem dan keamanan data, serta pengadaan perangkat teknologi informasi yang memadai untuk mendukung operasional bank.

Selain itu, BPR Bintang juga secara berkala melakukan pemantauan terhadap sistem teknologi informasi yang digunakan guna memastikan bahwa seluruh sistem berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui penerapan pengelolaan teknologi informasi yang baik, BPR Bintang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan perbankan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan.

Perkembangan Dan Target Pasar

Sepanjang tahun buku **2025**, **BPR Bintang** menunjukkan perkembangan kinerja usaha yang positif, yang tercermin dari pertumbuhan aset, peningkatan penyaluran kredit, serta perkembangan pada penghimpunan dana masyarakat. Pertumbuhan tersebut merupakan hasil dari upaya manajemen dalam memperkuat kegiatan usaha, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan pasar di wilayah operasional BPR.

1. Perkembangan Aset

Total aset **BPR Bintang** per **31 Desember 2025** tercatat sebesar **Rp272.201.661.307**, mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi **31 Desember 2024** yang sebesar **Rp257.724.168.529**. Dengan demikian, total aset BPR Bintang mengalami peningkatan sebesar **Rp14.477.492.778** atau **5,62%**.

Peningkatan total aset tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan kegiatan usaha bank yang didukung oleh peningkatan penyaluran kredit serta pengelolaan dana yang efektif.

2. Perkembangan Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana masyarakat yang terdiri dari **tabungan dan deposito** juga menunjukkan perkembangan yang beragam selama tahun 2025.

Pada produk **deposito**, dana yang berhasil dihimpun pada tahun **2025** tercatat sebesar **Rp93.404.402.068**, dibandingkan dengan tahun **2024** sebesar **Rp95.963.800.115**, sehingga mengalami **penurunan sebesar Rp2.559.398.047** atau sebesar **2,67%**.

Sementara itu, pada produk **tabungan**, dana yang dihimpun pada tahun **2025** tercatat sebesar **Rp109.651.954.524**, meningkat dibandingkan dengan tahun **2024** sebesar

Rp97.509.342.207, atau mengalami **peningkatan sebesar Rp12.142.612.317 atau sebesar 12,45%**.

Peningkatan pada produk tabungan menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan yang diberikan oleh BPR Bintang serta keberhasilan strategi pemasaran yang dilakukan dalam memperluas basis nasabah.

3. Perkembangan Penyaluran Kredit

Dalam hal penyaluran dana, **BPR Bintang** mencatat pertumbuhan yang signifikan pada penyaluran kredit. Jumlah kredit yang disalurkan (bruto) per **31 Desember 2025** tercatat sebesar **Rp207.989.420.315**, meningkat dibandingkan dengan posisi **31 Desember 2024** yang sebesar **Rp176.752.964.853**.

Dengan demikian, penyaluran kredit mengalami **peningkatan sebesar Rp31.236.455.462 atau sebesar 17,67%**. Pertumbuhan kredit tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan masyarakat serta peran aktif BPR Bintang dalam mendukung kegiatan ekonomi di wilayah operasionalnya.

4. Sektor Ekonomi dan Jenis Kredit yang Diberikan

Penyaluran kredit oleh BPR Bintang difokuskan pada berbagai sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk berkembang serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Kredit yang disalurkan antara lain mencakup pembiayaan kepada sektor **perdagangan, jasa, usaha mikro dan kecil, serta pembiayaan konsumtif kepada masyarakat**.

Selain itu, BPR Bintang juga menyediakan berbagai jenis produk kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, seperti **kredit konsumtif, kredit modal kerja, kredit investasi, serta kredit mikro bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM)**.

5. Target Pasar

Dalam pengembangan usahanya, BPR Bintang menetapkan target pasar yang difokuskan pada **masyarakat lokal, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pegawai, serta pelaku usaha produktif lainnya** di wilayah Kabupaten Bintang dan sekitarnya.

Dengan strategi pemasaran yang terarah serta pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, BPR Bintang diharapkan dapat terus meningkatkan jumlah nasabah, memperluas jangkauan layanan perbankan, serta memperkuat peran BPR dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Jumlah, Jenis, Dan Lokasi Kantor

Seluruh aktivitas operasional dan pelayanan **BPR Bintan** diselenggarakan melalui **Kantor Pusat, 1 (satu) Kantor Cabang, 2 (dua) Kantor Kas, dan 2 (dua) Kantor Kas Keliling**. Keberadaan jaringan kantor tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan perbankan.

Adapun **tempat kedudukan dan alamat kantor operasional serta pelayanan BPR Bintan per 31 Desember 2025** adalah sebagai berikut:

1. **Kantor Pusat** beralamat di **Jalan Permaisuri No. 88, Tanjung Uban, Kabupaten Bintan**.
2. **Kantor Cabang** beralamat di **Jalan DI Panjaitan Km. 9 Blok Daun No. 7, Tanjungpinang**.
3. **Kantor Kas** beralamat di **Jalan Wisata Bahari RT 002 RW 002, Kawal, Kabupaten Bintan**.
4. **Kantor Kas** beralamat di **Jalan Raya Tambelan, Desa Hilir**.
5. **Kantor Kas Keliling** beralamat di **Jalan Trikora RT 003 RW 009, Kelurahan Kijang Kota**.
6. **Kantor Kas Keliling** beralamat di **Jalan Indunsuri RT 002 RW 001, Kecamatan Seri Kuala Lobam**.

Dengan jaringan kantor tersebut, **BPR Bintan** berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah serta memperluas jangkauan layanan perbankan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bintan dan sekitarnya.

Kerjasama BPR

Dalam rangka mendukung pengembangan usaha serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, **BPR Bintan** secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, serta pihak swasta. Kerja sama tersebut bertujuan untuk memperluas jaringan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat sistem teknologi informasi, serta mendorong pertumbuhan bisnis BPR secara berkelanjutan.

Sepanjang tahun **2025**, BPR Bintang menjalin berbagai kerja sama strategis yang dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang sebagai berikut:

1. Kerja Sama Penghimpunan Dana

Dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana masyarakat serta mendukung program literasi dan inklusi keuangan, BPR Bintang menjalin kerja sama pembukaan **Rekening Simpanan Pelajar (SimPel)** dengan beberapa lembaga pendidikan di wilayah operasional BPR.

Kerja sama tersebut dilakukan dengan:

- a. **SD Negeri 10 Bintan**
- b. **Sekolah/Yayasan Bintan Resorts**
- c. **Sekolah/Yayasan Tunas Belia Bintan**
- d. **SLB Negeri Bintan**

Melalui kerja sama tersebut, BPR Bintang berupaya menumbuhkan budaya menabung sejak usia dini sekaligus memperluas basis nasabah di kalangan pelajar.

2. Kerja Sama Penyaluran Kredit

Dalam rangka memperluas penyaluran kredit serta meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat, BPR Bintang menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam bentuk penyaluran kredit, khususnya kredit dengan mekanisme **potong gaji (payroll lending)**.

Kerja sama tersebut antara lain dilakukan dengan:

- a. **Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan**
- b. **Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan**
- c. **Dinas BPBD Kabupaten Bintan**
- d. **SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur**
- e. **SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota**
- f. **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang**

Selain itu, BPR Bintang juga menjalin kerja sama dengan **PT Asuransi Simas Jiwa** dalam pemasaran produk **Asuransi Jiwa Kredit**, baik dengan skema **asuransi tetap maupun asuransi menurun**, guna memberikan perlindungan terhadap risiko kredit.

3. Kerja Sama Teknologi Informasi dan Digitalisasi

Dalam mendukung pengembangan layanan digital serta peningkatan kualitas sistem teknologi informasi, BPR Bintang menjalin kerja sama dengan beberapa penyedia jasa teknologi informasi.

Kerja sama tersebut antara lain meliputi:

- a. Pemanfaatan **Core Banking System (CBS) SLAIS DNAW** dengan **PT Gurindam Fajar Sinergi**.
- b. Pemanfaatan **Aplikasi Digital BiSmart** dengan **PT Interaksi Karya Nusantara**
- c. Kerja sama **Co-Branding, Payment Gateway Winpay, dan Host to Host** dengan **Bima Sakti**.
- d. Pemanfaatan **Aplikasi API** dengan **Gurindam Fajar Sinergi**.
- e. Pemanfaatan layanan jaringan dan aplikasi digital dengan **Lintas Arta**.
- f. Pemanfaatan **layanan Data Center** dengan **BP Batam**.

Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung digitalisasi layanan perbankan serta meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem teknologi informasi BPR.

4. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BPR Bintang juga menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah serta pengembangan ekonomi masyarakat.

Kerja sama tersebut antara lain meliputi:

- a. **Penempatan Uang Daerah** dengan **Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Bintan**.
- b. **Program Subsidi Bunga Kredit** dengan **Pemerintah Kabupaten Bintan**.
- c. **Pemanfaatan Data Kependudukan** dengan **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)**.

Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan peran BPR dalam mendukung program pembangunan daerah serta memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.

5. Kerja Sama Operasional dan Dukungan Kelembagaan

Dalam rangka mendukung kelancaran operasional dan penguatan tata kelola perusahaan, BPR Bintang juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam bidang operasional dan dukungan kelembagaan.

Kerja sama tersebut antara lain meliputi:

- a. **Pemeliharaan mesin hitung uang dan printer** dengan **CV. Perdana Sinergi Muda**.
- b. **Penyediaan mesin fotokopi** dengan **PT. Sinar Prima Raya**.
- c. **Sewa lahan parkir** dengan **Bagus Kurnia Rifandi**.
- d. **Penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara** dengan **Kejaksaaan Negeri Bintan**.

Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional BPR serta memastikan kepatuhan terhadap aspek hukum dan tata kelola yang baik.

6. Kerja Sama Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah dan pemberdayaan pelaku usaha lokal, BPR Bintan juga menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga terkait pengembangan kewirausahaan.

Kerja sama tersebut antara lain dilakukan dengan:

- a. **Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau**.
- b. **Dekranasda Kabupaten Bintan**.
- c. **Lembaga Inkubator Bintan Bangkit**.

Selain itu, BPR Bintan juga menjalin kerja sama **penjualan properti** dengan **Karya Bintan Sejati Properti** guna mendukung kegiatan pembiayaan sektor properti di wilayah operasional BPR.

Melalui berbagai kerja sama strategis tersebut, **BPR Bintan** terus berupaya meningkatkan kualitas layanan perbankan, memperluas akses keuangan bagi masyarakat, serta memperkuat peran BPR dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan operasional serta pengembangan usaha **BPR Bintan**. Oleh karena itu, manajemen senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai melalui pengelolaan SDM yang profesional serta pelaksanaan berbagai program pengembangan kapasitas pegawai secara berkelanjutan.

INFORMASI UMUM

1. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai

Per **31 Desember 2025**, jumlah pegawai **BPR Bintan** tercatat sebanyak **65 orang**, jumlah tersebut relatif sama dibandingkan dengan tahun **2024**. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan operasional perbankan.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	2025	2024
S3	0	0
S2	0	0
S1	36	35
D3	9	7
SMA	18	20
Lainnya	2	3
Jumlah	65	65

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa **pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana masih mendominasi**, yang mencerminkan komitmen BPR Bintan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pengembangan usaha dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah.

2. Pengembangan Kompetensi SDM

Dalam rangka meningkatkan kompetensi serta profesionalisme pegawai, **BPR Bintan secara konsisten menyelenggarakan dan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai kegiatan pelatihan, workshop, sertifikasi profesi, serta kegiatan studi banding** yang relevan dengan bidang tugas masing-masing.

Sepanjang tahun **2025**, pegawai BPR Bintan telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang meliputi antara lain:

INFORMASI UMUM

- a. **Pelatihan teknis perbankan**, seperti pelatihan analisis kredit, appraisal agunan, manajemen kredit bermasalah (NPL), hukum perkreditan, serta audit internal.
- b. **Pelatihan manajemen dan kepemimpinan**, seperti pelatihan leadership, analisa beban kerja, supervisor HRD, serta pengembangan emotional quotient bagi pimpinan.
- c. **Pelatihan manajemen risiko dan kepatuhan**, termasuk pelatihan manajemen risiko, strategi anti fraud, perlindungan konsumen, APU PPT dan PPPSPM.
- d. **Pelatihan teknologi informasi dan digitalisasi**, seperti pelatihan secure computer user serta pelatihan jaringan teknologi informasi.
- e. **Pelatihan bidang administrasi dan operasional**, seperti pelatihan akuntansi, perpajakan, pengarsipan digital, serta sistem pengupahan dan KPI.
- f. **Program sertifikasi profesi**, seperti sertifikasi audit internal, sertifikasi supervisor operasional, penyegaran sertifikasi direktur dan komisaris.
- g. **Kegiatan studi tiru**, antara lain studi tiru ke **Bank Bogor, PT BPR Wonosobo**, serta kegiatan benchmarking internasional.

Selama tahun **2025**, total kegiatan pengembangan SDM yang diikuti oleh pegawai **BPR Bintan** mencapai **45 kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi**, dengan **total biaya pelatihan sebesar Rp430.916.635**.

Pelaksanaan berbagai program pelatihan dan pengembangan tersebut merupakan bagian dari komitmen manajemen dalam meningkatkan **kompetensi, profesionalisme, serta integritas pegawai**, sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja perusahaan serta memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.

Dengan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, **BPR Bintan** diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan perbankan, memperkuat tata kelola perusahaan, serta mendukung pertumbuhan usaha BPR secara berkelanjutan.

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Laporan Posisi Keuangan

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dalam rupiah	1.144.317.800	1.458.696.000
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	1.483.544.922	1.321.424.693
Penempatan pada Bank Lain	54.528.994.947	71.784.892.432
PPKA Penempatan pada Bank Lain	-	(37.508.817)
Kredit yang Diberikan	207.989.420.315	176.752.964.853
Provisi dan biaya transaksi yang ditangguhkan - bersih	(1.558.946.905)	(1.486.747.389)
PPKA Kredit yang Diberikan	-	(3.186.994.364)
CKPN Kredit yang Diberikan	(3.748.207.164)	-
Jumlah Aset Lancar	259.839.123.914	246.606.727.408
ASET TIDAK LANCAR		
Aset Tetap dan Inventaris	6.752.781.262	6.065.402.701
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	(4.694.754.352)	(4.278.680.433)

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Agunan Yang Diambil Alih	8.436.359.940	8.636.459.940
Aset Lain-lain	1.868.150.543	694.258.914
Jumlah Aset Tidak Lancar	12.362.537.393	11.117.441.122
JUMLAH ASET	272.201.661.307	257.724.168.530
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
Kewajiban Segera Dibayar	4.508.822.901	4.213.417.340
Utang Bunga	453.955.647	545.033.764
Utang Pajak	560.234.294	337.198.170
Simpanan Nasabah	203.056.356.592	193.473.142.322
Simpanan Dari Bank Lain	18.300.423.371	15.500.423.371
Jumlah Kewajiban	226.879.792.805	214.069.214.967
EKUITAS		
Modal	20.000.000.000	20.000.000.000
Modal Sumbangan	1.500.000.000	1.500.000.000
Cadangan Umum	9.963.563.752	9.567.337.375
Cadangan Tujuan	9.021.578.792	8.625.352.415
Saldo Laba	4.836.725.958	3.962.263.773
Jumlah Ekuitas	45.321.868.502	43.654.953.563
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	272.201.661.307	257.724.168.530

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
Pendapatan Operasional		
Pendapatan Bunga	25.795.800.455	23.464.029.442
Pendapatan Provisi dan Administrasi	998.007.999	611.497.323
Pendapatan Operasional Lainnya	1.865.257.554	6.519.019.823
Jumlah Pendapatan Operasional	28.659.066.008	30.594.546.588
Beban Operasional		
Beban Bunga	7.716.223.481	7.022.569.736
Beban Penyisihan Kerugian	-	5.589.267.349
Beban Operasional Lainnya	14.667.068.428	12.807.796.478
Jumlah Beban Operasional	22.383.291.909	25.419.633.563
Laba (Rugi) Usaha	6.275.774.099	5.174.913.025
Pendapatan dan (Beban) Non-Operasional		
Pendapatan Non-Operasional	11.281.833	-
Beban Non-Operasional	136.559.672	260.047.364
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional	(125.277.839)	(260.047.364)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	6.150.496.260	4.914.865.661
Taksiran Pajak Penghasilan	1.313.770.302	952.601.889
Laba (Rugi) Neto	4.836.725.958	3.962.263.772

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Laporan Perubahan Ekuitas

Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Laba/Rugi Yang Belum Direalisasi	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditetapkan Pengunaannya	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2023	20.000.000.000	-	1.500.000.000	-	-	-	8.356.761.782	9.232.052.661	3.352.847.139	42.441.661.582
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	-	-	268.590.633	335.284.714	(670.569.428)	(66.694.081)
DSM Ekuitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba/Rugi Periode Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	3.962.263.773	3.962.263.773
Pos Penambah/Pengurangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.682.277.711)	(2.682.277.711)
Saldo per 31 Desember 2024	20.000.000.000	-	1.500.000.000	-	-	-	8.625.352.415	9.567.337.375	3.962.263.773	43.654.953.563
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.962.263.773)	(3.962.263.773)
Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	-	-	396.226.377	396.226.377	-	792.452.754
DSM Ekuitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba/Rugi Periode Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	4.836.725.958	4.836.725.958
Pos Penambah/Pengurangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2025	20.000.000.000	-	1.500.000.000	-	-	-	9.021.578.792	9.963.563.752	4.836.725.958	45.321.868.502

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan Arus Kas

Uraian	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Penerimaan pendapatan bunga	25.633.680.226	23.305.085.423
Penerimaan pendapatan provisi, komisi dan premi	998.007.999	611.497.323
Pembayaran beban bunga	(7.716.223.481)	(7.022.569.736)
Pendapatan operasional lainnya	1.865.257.554	6.519.019.823
Beban operasional lainnya	(14.667.068.428)	(12.807.796.478)
Beban gaji dan tunjangan	(10.278.472.394)	(9.643.208.079)
Beban umum dan administrasi	8.662.909.206	2.711.922.714
Beban non-operasional	(136.559.672)	(260.047.364)
Pendapatan non-operasional	11.281.833	-
Pembayaran pajak penghasilan badan	1.313.770.302	952.601.889
Penurunan/(kenaikan) atas aset operasional:		
Kredit yang diberikan	(31.236.455.462)	(24.659.715.032)
Aset yang diambil alih	200.100.000	1.079.715.686
Aset lain-lain	(1.173.891.629)	(259.936.378)
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-
Kenaikan/(penurunan) atas liabilitas operasional:		
Liabilitas segera	427.363.568	(1.871.069.569)
Tabungan	12.142.612.317	8.304.174.634
Deposito	(2.559.398.047)	(14.429.524.433)
Simpanan dari bank lain	2.800.000.000	15.200.423.371
Pinjaman yang diterima	-	-
Liabilitas imbalan kerja	-	-
Liabilitas lain-lain	-	-

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Kas neto dari aktivitas operasional	(13.713.086.105)	(12.269.426.206)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(687.378.561)	(592.897.267)
Kas neto dari aktivitas investasi	(687.378.561)	(592.897.267)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan/pembayaran pembentukan cadangan	792.452.754	(66.694.081)
Penerimaan/pembayaran modal lainnya	(3.962.263.773)	(2.682.277.711)
Kas neto dari aktivitas pendanaan	(3.169.811.019)	(2.748.971.792)
Perubahan Kas		
Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	(17.570.275.685)	(15.611.295.266)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	73.243.588.432	88.854.883.698
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	55.673.312.747	73.243.588.432
Rincian Kas dan Setara Kas		
Kas Tunai	1.144.317.800	1.458.696.000
Penempatan Pada Bank Lain - Giro	3.955.242.055	6.367.005.135
Penempatan Pada Bank Lain - Tabungan	18.273.752.891	8.317.887.296
Penempatan Pada Bank Lain - Deposito	32.300.000.000	57.100.000.000
Jumlah	55.673.312.747	73.243.588.431

Laporan Komitmen Dan Kontijensi

	2025	2024
	(Rp)	(Rp)
KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik	-	-

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

2. Fasilitas kredit kepada nasabah dan belum ditarik	17.185.170.789	6.759.610.523
3. Lain-lain	-	-
Jumlah Komitmen	17.185.170.789	6.759.610.523
KONTIJENSI		
1. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2.374.735.792	1.851.401.981
2. Aset produktif yang dihapusbukukan	3.127.072.188	5.049.389.699
3. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	-	-
4. Tagihan kontijensi lainnya	357.877.509	354.487.161
Jumlah Kontijensi	5.859.685.489	7.255.278.841

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

1. PENJELASAN UMUM PENERAPAN TATA KELOLA

Informasi	Keterangan
Alamat	Jl Permaisuri No 88 Tanjung Uban Kabupaten Bintan
Nomor Telepon	077182380
Penjelasan Umum	Penilaian atas penerapan tata kelola yang dilakukan melalui self assessment bertujuan untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses self-assessment ini mencakup evaluasi terhadap berbagai aspek tata kelola yang meliputi: 1. Transparansi, Ketersediaan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu bagi pemangku kepentingan. 2. Akuntabilitas, Kejelasan fungsi, struktur, dan tanggung jawab setiap organ dalam organisasi. 3. Responsibilitas, Kepatuhan terhadap regulasi serta pemenuhan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan. 4. Independensi, Pengambilan keputusan yang bebas dari konflik kepentingan. 5. Kewajaran, Perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

Nama	Radhiah
Jabatan	Direktur Utama
Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Direksi dan operasional keseluruhan BPR. Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Mewakili BPR dalam hubungan dengan pihak eksternal, termasuk regulator, nasabah, dan mitra bisnis. Menetapkan target kinerja BPR dan memantau pencapaiannya. Memastikan terlaksananya strategi bisnis dan rencana kerja BPR. Bertindak sebagai juru bicara utama BPR. Merumuskan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk produk dan layanan BPR.

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Mengelola dan mengembangkan portofolio kredit BPR, termasuk penyaluran dan penagihan. 9. Mengelola dan mengembangkan dana pihak ketiga (DPK), termasuk tabungan dan deposito. 10. Mengidentifikasi peluang pasar baru dan mengembangkan produk inovatif. 11. Membangun dan memelihara hubungan baik dengan nasabah. 12. Menganalisis tren pasar dan persaingan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. 13. Bertanggung jawab atas kelancaran dan efisiensi seluruh operasional harian BPR. 14. Mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi BPR. 15. Mengawasi proses layanan nasabah, termasuk pembukaan rekening, transaksi, dan penanganan keluhan. 16. Bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap dan inventaris BPR. 17. Mengelola sumber daya manusia BPR, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan (jika fungsi SDM berada di bawahnya). 18. Memastikan standar operasional prosedur (SOP) diterapkan secara konsisten.
--	--

Nama	Siti Harlisah
Jabatan	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan secara keseluruhan di BPR. 2. Menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur kepatuhan BPR. 3. Memantau dan memastikan kepatuhan BPR terhadap seluruh peraturan perundang-undangan

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

	<p>yang berlaku serta ketentuan internal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Memberikan nasihat dan saran terkait isu-isu kepatuhan kepada Direksi dan seluruh unit kerja. 5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pemeriksaan oleh regulator dan auditor eksternal terkait aspek kepatuhan. 6. Melaporkan temuan dan rekomendasi terkait kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris 7. Memastikan Direktur Utama dalam memastikan BPR beroperasi sesuai dengan prinsip GCG. 8. Memastikan seluruh unit kerja mematuhi ketentuan yang berlaku. 9. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia (manusia, anggaran dan infrastruktur) yang cukup dan kompeten untuk fungsi kepatuhan. 10. Bertanggung jawab atas APU, PPT dan PPPSPM.
--	---

Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris:

Setiap ada ketentuan yang baru, BPR langsung membuat ketentuan baru dan mensosialisasikan kepada unit kerja terkait.

3. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama	Johnson Pasaribu
Jabatan	Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 2. Berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan. 3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

	transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sedikit tiga perempat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit tiga perempat bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.
--	--

Nama	Ronny Kartika
Jabatan	Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab	1. Melakukan pengawasan terhadap Perseroan. 2. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan

Rekomendasi kepada Direksi: Mengevaluasi dan mengkinikan prosedur internal agar memenuhi ketentuan yang berlaku. Memantau dan memastikan proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan, serta menyusun informasi keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di SJK.

4. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, PROGRAM KERJA, DAN REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE

BPR Bintang belum ada komite karena Modal Inti dibawah Rp50 Milyar

5. STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE

BPR Bintang belum ada komite karena Modal Inti dibawah Rp50 Milyar

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

6. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA BPR

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi				
RADHIAH				
SITI HARLISAH				
Anggota Dewan Komisaris				
JOHNSON PASARIBU				
RONNY KARTIKA				

7. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham tidak ada kepemilikan saham pada kelompok usaha. BPR Bintang tidak memiliki kelompok usaha.

8. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

Ada satu Dewan Pengawas (Johnson Pasaribu) memiliki saham pada BPR Kepri Bintang sebesar 2,51%.

9. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Anggota Direksi			
RADHIAH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
SITI HARLISAH	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Tidak ada hubungan keuangan antara sesama atau antar Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham

10. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR

Tidak ada hubungan keluarga antara sesama atau antar Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham.

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

11. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	2	313.761.800	2	436.544.600
Tunjangan	2	777.600.000	2	0
Tarifans	2	0	2	0
Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Remunerasi		1.091.361.800		436.544.600
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	2	117.000.000	2	0
Transportasi	2	0	2	0
Auransi Kesehatan	2	0	2	0
Fasilitas Lain-Lainnya	2	32.400.000	2	0
Total Fasilitas Lain		149.400.000		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.240.761.800		436.544.600

Paket remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR Bintang ditetapkan oleh RUPS mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.

12. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,20

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan. Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan pegawai per bulan.

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

13. PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
04-02-2025	2	1. Penyampaian Laporan Keuangan Semester II, 2. Laporan Tindak Lanjut KAP Tahun Buku 2024, 3. Rencana RUPS atas penanggungjawaban Direksi Tahun Buku 2024, 4. Rencana Utang Tahun BPR Bintang ke 17 Tahun 2025, 5. Penerapan APU PPT, 6. Hal-hal lain
16-03-2025	2	1. Laporan Revisi RBB sesuai dengan saran OJK, 2. Laporan Progres Perubahan Nomenklatur dan Badan Hukum, 3. Rencana Penyaluran Gaji PPPK, 4. Hal-hal lain yang perlu di bahas
17-06-2025	2	1. Laporan Rencana Revisi RBB, 2. Perkembangan Ranperda Perubahan Nomenklatur dan Badan Hukum BPR Bintang, 3. Laporan Perkembangan Pembukaan Rekening Tabungan Gaji untuk PPPK, 4. Rasio NPL dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, 5. Penerapan APU PPT dan Anti Fraud, 6. Hal-hal lain yang perlu di bahas
08-09-2025	2	1. Penerapan APU PPT & PPSPM, 2. Laporan Direksi tentang ketentuan Penerapan Perlindungan Konsumen, 3. Persiapan Pengajuan Izin Prinsip Pengajuan Perubahan Nomenklatur dan Badan Hukum ke OJK, 4. Laporan Perkembangan Pembukaan Rekening Tabungan Gaji untuk PPPK, 5. Perkembangan penyelesaian AYDA dan NPL Bank, 6. Literasi dan Inklusi BPR Bintang
05-11-2025	2	1. RBB Tahun 2026, 2. Laporan tindak lanjut KAP tahun buku 2026, 3. Kebijakan Unit Fraud, 4. Perubahan nomenklatur dan badan hukum, 5. Persiapan SAKEP, 6. Tata Kelola, 7. APU PPT, 8. Progress aplikasi BISmart, 9. Hal lain

Rapat Dewan Komisaris diadakan bersama dengan Direksi.

14. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
JOHNSON PASARIBU	5	0	100,00
RONNY KARTIKA	5	0	100,00

Rapat Dewan Komisaris diadakan bersama dengan Direksi.

15. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Tidak ada Fraud selama tahun 2025

16. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Tidak ada permasalahan hukum yang terjadi pada Tahun 2025

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

17. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama Tahun 2025 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

18. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Dinas/Politik)	Penggunaan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
20-02-2025	01	Hari Kanker Sedunia	YKI Bintang	1.500.000
21-02-2025	01	Pentas Seni	IGTKI PGRI Teluk Selong	500.000
08-03-2025	01	Tarbiyah Ramadhan	DWP RS,KO EHD	700.000
06-03-2025	01	HUT	SMP 12 Bintang	300.000
22-04-2025	01	Pembangunan	TK IT Tahfidz Adekul Islami	1.000.000
23-04-2025	01	Karya Marching Show Bank 2025	Carat Bintang Utara	300.000
25-04-2025	01	Safari Ramadhan	Kabupaten Bintang	25.000.000
06-05-2025	01	May Day	Kabupaten Bintang	1.990.000
16-05-2025	01	Pemberian Pupuk	Kejar Bintang	21.754.000
03-07-2025	01	Roadshow Bazar UMKM	Tamrah Bazar Kejar	500.000
03-07-2025	01	Pedekemahan Winkarya	Parada Pedekemahan Winkarya	500.000
03-07-2025	01	Futsal Carrot Cup II	Kelua pelaksana carot cup	1.000.000
03-07-2025	01	HUT 74	Ikatan Bala Indonesia	1.000.000
15-07-2025	01	Turunan Sepakbola	Sosial	1.000.000
04-08-2025	01	Pawai Nusantara HUT RI 80	Carot Binut	1.000.000
07-08-2025	01	Talk Show Merdeka Dari Rasa Cemas	RS,JKO	500.000
07-08-2025	01	Gerak Jalan	PKK Kab Bintang	5.000.000

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Dinas/Politik)	Penggunaan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
31-12-2025	01	Bedah Rumah PMI	PMI Bintang	2.000.000

BPR Bintang di tahun 2025 telah mengalokasikan dana CSR sejumlah Rp118.867.914,00, dengan sisa saldo CSR tahun sebelumnya Rp19.002.364,00 dan realisasi pemakaian sebesar Rp80.274.000,00 yang seluruhnya disalurkan untuk kegiatan sosial (kode 01) dan tidak ada penyaluran dana untuk kegiatan politik (kode 02).



HAI SOBAT BPR BINTAN !

*Kali ini BPR Bintan mau
berbangga diri dulu yaaa...!!!*

BPR Bintan berhasil meraih
Juara 2 (2nd Place Winner)
dalam kompetisi :
AML CFT CPF Office Battle 2025
yang diselenggarakan oleh PPATK
(Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan).

*Mau tau ini kompetisi apa??
Yuk simak informasi dislide selanjutnya*

www.bprbintan.co.id

haki@bprbintan.co.id [@bprbintan](https://www.instagram.com/bprbintan) [pdbprbintan](https://www.facebook.com/pdbprbintan)

BPR BINTAN Merupakan peserta pengemban LPS & BPR BINTAN Berada dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



BANK SAHABAT ANAK NEGERI

BANKNYA ORANG BINTAN

Lebih dari sekadar kompetisi, pencapaian ini membuktikan bahwa **integritas** dan **kepatuhan** merupakan nilai utama yang dijunjung tinggi oleh BPR Bintan dalam menjalankan kegiatan usaha dan tata kelola perusahaan.
Terima kasih atas kerja keras seluruh insan BPR Bintan yang telah berkontribusi dalam prestasi ini.



www.bprbintan.co.id

haki@bprbintan.co.id [@bprbintan](https://www.instagram.com/bprbintan) [pdbprbintan](https://www.facebook.com/pdbprbintan)

BPR BINTAN Merupakan peserta pengemban LPS & BPR BINTAN Berada dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



BANK SAHABAT ANAK NEGERI

BANKNYA ORANG BINTAN

Ini merupakan kompetisi nasional di bidang kepatuhan dan pencegahan kejahatan keuangan. Kompetisi ini diikuti oleh **98 Penyedia Jasa Keuangan** dari berbagai sektor di seluruh Indonesia.

Keberhasilan BPR Bintan menduduki **peringkat kedua nasional** tak lepas dari dukungan penuh yang diberikan oleh Manajemen beserta seluruh keluarga besar BPR Bintan.



www.bprbintan.co.id

haki@bprbintan.co.id [@bprbintan](https://www.instagram.com/bprbintan) [pdbprbintan](https://www.facebook.com/pdbprbintan)

BPR BINTAN Merupakan peserta pengemban LPS & BPR BINTAN Berada dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



BANK SAHABAT ANAK NEGERI

BANKNYA ORANG BINTAN

Ini merupakan kompetisi nasional di bidang kepatuhan dan pencegahan kejahatan keuangan. Kompetisi ini diikuti oleh **98 Penyedia Jasa Keuangan** dari berbagai sektor di seluruh Indonesia.

Keberhasilan BPR Bintan menduduki **peringkat kedua nasional** tak lepas dari dukungan penuh yang diberikan oleh Manajemen beserta seluruh keluarga besar BPR Bintan.



www.bprbintan.co.id

haki@bprbintan.co.id [@bprbintan](https://www.instagram.com/bprbintan) [pdbprbintan](https://www.facebook.com/pdbprbintan)

BPR BINTAN Merupakan peserta pengemban LPS & BPR BINTAN Berada dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



BANK SAHABAT ANAK NEGERI

BANKNYA ORANG BINTAN



SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Radhiah
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Siti Harlisah
Jabatan : Direktur

Sesuai POJK nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, dengan ini Direksi PT BPR BINTAN (Perseroda) menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab dalam penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan tahunan ini. Untuk itu telah ditunjuk seorang penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengendalian yang dilakukan adalah memastikan laporan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
2. Data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan BPR tahun 2025 adalah benar dan telah diaudit oleh Akuntan Indarto Waluyo dari Kantor Akuntan Publik Indarto dan Yudhika
3. Seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan 2025 telah dimuat secara lengkap dan benar dan Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan tahun 2025 dinilai cukup efektif dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Bintan, 31 Maret 2026

PT BPR BINTAN (Perseroda)



Radhiah

Direktur Utama



Siti Harlisah

Direktur

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025 Dengan Perbandingan 2024

Dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN	i
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	ii
LAPORAN KEUANGAN	
· Neraca	1
· Laporan Laba Rugi	2
· Laporan Perubahan Ekuitas	3
· Laporan Arus Kas	4
· Laporan Komitmen dan Kontijensi	5
Catatan Atas Laporan Keuangan.....	6
Analisa Laporan Keuangan.....	35
Lampiran	

SURAT PERNYATAAN DIREKSI



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Radhiah
Alamat Kantor : Jl. Permaisuri, Tj. Uban Kota, Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA) periode 31 Desember 2025.
2. Laporan keuangan PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA) periode 31 Desember 2025 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA) periode 31 Desember 2025 telah dimuat secara lengkap dan benar,
b. Laporan keuangan PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA) periode 31 Desember 2025 tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan pada PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA) periode 31 Desember 2025.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bintan, 10 Maret 2026



Radhiah

Direktur Utama

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00059/2.1358/AU.8/07/0906-1/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Pengawas, dan Direksi

Perumda BPR Bintan

Di Kepulauan Riau

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Perumda BPR Bintan ("Perusahaan"), yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan Perumda BPR Bintan terlampir untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal-Hal Lain

- (i) Seperti yang dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan nomor "2.p.", bahwasanya Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) berdasar Surat Keputusan Direksi Perumda BPR Bintan Nomor: 004/Dir/BPR Bintan/01255..
- (ii) Laporan Keuangan Perumda BPR Bintan per 31 Desember 2024, diaudit oleh akuntan publik Dony dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, sesuai laporannya No: 00007/2.1476/AU.2/07/1666-4/1/III/2025 tertanggal 10 Februari 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Indarto dan Yudhika
Managing Partner

Indarto Waluyo, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI.
NRAP. AP.0906
Yogyakarta, 10 Maret 2026: DK



LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2025 (SAK EP)	31 Des 2024 (SAK ETAP)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas	3.	1.144.317.800	1.458.696.000
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	4.	1.483.544.922	1.321.424.693
Penempatan pada Bank Lain	5.	54.528.994.947	71.784.892.432
PPKA Penempatan pada Bank Lain	5.	-	(37.508.817)
Kredit yang Diberikan	6.	207.989.420.315	176.752.964.853
Provisi dan biaya transaksi yang ditangguhkan - bersih	6.	(1.558.946.905)	(1.486.747.389)
PPKA Kredit yang Diberikan	6.	-	(3.186.994.364)
CKPN Kredit yang Diberikan	6.	(3.748.207.164)	-
Jumlah Aset Lancar		259.839.123.914	246.606.727.408
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap dan Inventaris	7.	6.752.781.262	6.065.402.701
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	7.	(4.694.754.352)	(4.278.680.433)
Agunan Yang Diambil Alih	8.	8.436.359.940	8.636.459.940
Aset Lain-lain	9.	1.868.150.543	694.258.914
Jumlah Aset Tidak Lancar		12.362.537.393	11.117.441.122
JUMLAH ASET		272.201.661.307	257.724.168.529
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera Dibayar	10.	4.508.822.901	4.213.417.340
Utang Bunga	11.	453.955.647	545.033.764
Utang Pajak	12.	560.234.294	337.198.170
Simpanan Nasabah	13.	203.056.356.592	193.473.142.322
Simpanan Dari Bank Lain	14.	18.300.423.371	15.500.423.371
Jumlah Kewajiban		226.879.792.805	214.069.214.967
EKUITAS			
Modal	15.	20.000.000.000	20.000.000.000
Modal Sumbangan	16.	1.500.000.000	1.500.000.000
Cadangan Umum	16.	9.963.563.752	9.567.337.375
Cadangan Tujuan	16.	9.021.578.792	8.625.352.415
Saldo Laba	16.	4.836.725.958	3.962.263.773
Jumlah Ekuitas		45.321.868.502	43.654.953.563
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		272.201.661.307	257.724.168.529

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Bintan, 10 Maret 2026

 Radniah
 Direktur Utama

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2025	31 Des 2024
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Bunga	17.	25.795.800.455	23.464.029.442
Pendapatan Provisi Dan Administrasi	17.	998.007.999	611.497.323
Pendapatan Operasional Lainnya	18.	1.865.257.554	6.519.019.823
Jumlah Pendapatan Operasional		<u>28.659.066.008</u>	<u>30.594.546.588</u>
Beban Operasional			
Beban Bunga	19.	7.716.223.481	7.022.569.736
Beban Penyisihan Kerugian	20.	-	5.589.267.349
Beban Operasional Lainnya	21.	14.667.068.428	12.807.796.478
Jumlah Beban Operasional		<u>22.383.291.908</u>	<u>25.419.633.563</u>
Laba (Rugi) Usaha		<u>6.275.774.100</u>	<u>5.174.913.026</u>
Pendapatan dan (Beban) Non-Operasional			
Pendapatan Non-Operasional:	22.	11.281.833	-
Beban Non-Operasional:	22.	136.559.672	260.047.364
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional		<u>(125.277.839)</u>	<u>(260.047.364)</u>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		<u>6.150.496.260</u>	<u>4.914.865.662</u>
Taksiran Pajak Penghasilan	23.	1.313.770.302	952.601.889
Laba (Rugi) Neto		<u>4.836.725.958</u>	<u>3.962.263.773</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Bintan, 10 Maret 2026

Radhiah
Direktur Utama

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Penerimaan pendapatan bunga	25.633.680.226	23.305.085.423
Penerimaan pendapatan provisi, komisi dan premi	998.007.999	611.497.323
Pembayaran beban bunga	(7.716.223.481)	(7.022.569.736)
Pendapatan operasional lainnya	1.865.257.554	6.519.019.823
Beban operasional lainnya	(14.667.068.428)	(12.807.796.478)
Beban gaji dan tunjangan	(10.278.472.394)	(9.643.208.079)
Beban umum dan administrasi	8.662.909.206	2.711.922.714
Beban nonoperasional	(136.559.672)	(260.047.364)
Pendapatan nonoperasional	11.281.833	-
Pembayaran pajak penghasilan badan	1.313.770.302	952.601.889
Penurunan/(kenaikan) atas aset operasional:		
Kredit yang diberikan	(31.236.455.462)	(24.659.715.032)
Aset yang diambil alih	200.100.000	1.079.715.686
Aset lain-lain	(1.173.891.629)	(259.936.378)
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan		
Kenaikan/(penurunan) atas liabilitas operasional:		
Liabilitas segera	427.363.568	(1.871.069.569)
Tabungan	12.142.612.317	8.304.174.634
Deposito	(2.559.398.047)	(14.429.524.433)
Simpanan dari bank lain	2.800.000.000	15.200.423.371
Pinjaman yang diterima	-	-
Liabilitas imbalan kerja	-	-
Liabilitas lain-lain	-	-
Kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasional	(13.713.086.105)	(12.269.426.206)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(687.378.561)	(592.897.267)
Kas netto yang diperoleh dari aktivitas investasi	(687.378.561)	(592.897.267)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan/pembayaran pembentukan cadangan	792.452.754	(66.694.081)
Penerimaan/pembayaran modal lainnya	(3.962.263.773)	(2.682.277.711)
Kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(3.169.811.019)	(2.748.971.792)
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(17.570.275.685)	(15.611.295.266)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	73.243.588.432	88.854.883.698
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	55.673.312.747	73.243.588.432
Terdiri dari:		
Kas Tunai	1.144.317.800	1.458.696.000
Penempatan Pada Bank Lain Giro	3.955.242.055	6.367.005.135
Penempatan Pada Bank Lain Tabungan	18.273.752.891	8.317.887.296
Penempatan Pada Bank Lain Deposito	32.300.000.000	57.100.000.000
Jumlah	55.673.312.747	73.243.588.431

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Laba/Rugi Yang Belum Direalisasi	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditetapkan Penggunaannya	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2023	20.000.000.000	-	1.500.000.000	-	-	-	8.356.761.782	9.232.052.661	3.352.847.139	42.441.661.582
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	-	-	268.590.633	335.284.714	(670.569.428)	(66.694.081)
DSM Ekuitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba/Rugi Periode Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	3.962.263.773	3.962.263.773
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.682.277.711)	(2.682.277.711)
Saldo per 31 Desember 2024	20.000.000.000	-	1.500.000.000	-	-	-	8.625.352.415	9.567.337.375	3.962.263.773	43.654.953.563
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.962.263.773)	(3.962.263.773)
Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	-	-	396.226.377	396.226.377	-	792.452.754
DSM Ekuitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba/Rugi Periode Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	4.836.725.958	4.836.725.958
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2025	20.000.000.000	-	1.500.000.000	-	-	-	9.021.578.792	9.963.563.752	4.836.725.958	45.321.868.502

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	2025	2024
	(Rp)	(Rp)
KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik	-	-
2. Fasilitas kredit kepada nasabah dan belum ditarik	17.185.170.789	6.759.610.523
3. Lain-lain	-	-
Jumlah Komitmen	17.185.170.789	6.759.610.523
KONTIJENSI		
1. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2.374.735.792	1.851.401.981
2. Aset produktif yang dihapusbukukan	3.127.072.188	5.049.389.699
3. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	-	-
4. Tagihan kontijensi lainnya	357.877.509	354.487.161
Jumlah Kontijensi	5.859.685.489	7.255.278.841

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT. Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau No. 5 Tahun 2005, ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Riau Ansar Ahmad, SE, MM di Tanjungpinang pada tanggal 24 Oktober 2005. Pembentukan Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 2 Tahun 2019 pada tanggal 15 Maret 2019.

Perusahaan berdomisili di Jl. Permaisuri Tanjung Uban Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, memberikan kredit kepada usaha kecil dan menengah serta melakukan pembinaan terhadap pengusaha dan nasabah, memberikan kredit kepada koperasi yang berbadan hukum setelah mendapat rekomendasi dari instansi pembina teknis, menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 19 Januari 2007, Perusahaan memperoleh persetujuan prinsip pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda) 9/29/DPBPR serta keputusan dari Gubernur Bank Indonesia tentang izin operasional PT. Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda) No. 10/6/KEP.GBI/DpG/2008 perihal persetujuan izin usaha PT. Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda).

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan PT. Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda) adalah sebagai berikut:

- 1) Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Jasa Keuangan, bukan Asuransi dan Dana Pensiun
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun:

Bank Perkreditan Rakyat (64131). Menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Perijinan Usaha

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120005552445 yang dikeluarkan pada 24 Mei 2019.
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Batam No. 02.483.227.1-217.000.

d. Susunan Pengurus

Susunan manajemen Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut :

Ketua Pengawas : Johnson Pasaribu
Pengawas : Ronny Kartika
Direktur Utama : Radhiah
Direktur : Siti Harlisah

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pernyataan Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen PT. Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda) menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2025 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding 2024 Audited disajikan berdasarkan:

- 1) SAK EP (Entitas Privat);
Laporan keuangan BPR disusun sesuai dengan SAK EP. Sedangkan PA BPR merupakan petunjuk teknis bagi BPR dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK yang efektif saat ini. PA BPR bukan merupakan pengganti SAK EP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BPR. PA BPR tersebut sesuai dengan SE OJK No. 21/SEOJK.03/2024 Tentang Panduan Akuntansi Perbankan BPR.
- 2) Ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan BPR; dan
- 4) Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum dan standar akuntansi keuangan selain SAK EP.

2. IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

b. Bahasa laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dalam Bahasa Indonesia.

c. Tanggung jawab atas laporan keuangan

Direksi BPR bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

d. Mata uang pelaporan

- 1) Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Apabila transaksi BPR menggunakan mata uang selain dari rupiah, maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, BPR menggunakan kurs sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- 2) Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Transaksi dalam mata uang asing harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

e. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan

BPR menyusun laporan keuangan menggunakan dasar akuntansi akrual, kecuali untuk informasi arus kas. Dalam dasar akrual, BPR mengakui aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan atau beban ketika definisi dan kriteria pengakuan terpenuhi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.36).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

f. Laporan Posisi Keuangan

1) Aset

Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan sumber manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan diterima BPR. (Hal ini mengacu pada SAK EP lampiran B).

Adapun pos-pos yang merupakan aset keuangan seperti surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit, dan penyertaan modal disertai dengan pos pengurang berupa CKPN.

BPR menghitung Penyisihan Penghapusan Kualitas Aset (PPKA) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai kualitas aset BPR. Apabila nilai PPKA lebih besar dari CKPN yang dibentuk BPR sesuai dengan SAK EP, maka selisih nilai PPKA dengan CKPN menjadi faktor pengurang dalam perhitungan modal inti BPR.

BPR mengakui aset dalam laporan posisi keuangan ketika kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan akan mengalir ke BPR dan nilai aset dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.37).

a) Kas

Kas adalah mata uang kertas atau logam dalam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin anjungan tunai mandiri (ATM), dan kas dalam perjalanan. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative coins/notes), dan mata uang emas.

b) Kas dalam valuta asing

Kas dalam valuta asing adalah uang kertas asing (*banknotes*) dan *traveller's cheque* yang masih berlaku yang dimiliki BPR dalam kegiatan penukaran sebagai pedagang valuta asing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. SAK EP Bab 30 tentang Penjabaran Valuta Asing. BPR dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Mata uang asing diakui sebesar kurs transaksi (*spot rate*) yang berlaku pada tanggal perolehan/transaksi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 30.7). Pada setiap tanggal pelaporan BPR menjabarkan kas dalam valas ke rupiah dengan kurs penutup. Kurs penutup yang dirujuk adalah kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan dengan menggunakan kurs tengah yaitu kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli mata uang asing Bank Indonesia dibagi dua. Kas dalam valuta asing disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar nilai nominal.

c) Surat Berharga

Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah Pusat Republik Indonesia, dan/atau Pemerintah Daerah.

Surat berharga diukur pada biaya perolehan ditambah/dikurangi biaya transaksi. Contoh biaya transaksi yaitu *brokerage fee*. Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Surat berharga disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d) Penempatan Pada Bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain baik konvensional maupun syariah dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai secondary reserve. Cakupan penempatan pada bank lain adalah penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan penempatan dana lainnya yang sejenis. Nilai tercatat penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat liabilitas pada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

- Giro merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.
- Tabungan merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan deposit on call. Deposit on call merupakan deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
- Sertifikat deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor.
- Penempatan pada bank syariah merupakan penempatan dana pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum dan BPR syariah dengan menggunakan akad syariah. Perlakuan akuntansi merujuk kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Giro, deposito, dan tabungan pada bank lain pada umumnya dicatat sebesar biaya perolehan, kecuali untuk produk sertifikat deposito dengan diskonto. Pengukuran selanjutnya, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank lain neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi CKPN. CKPN penempatan pada bank lain disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari penempatan tersebut.

e) Kredit yang Diberikan

Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang.

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan ditambah/dikurangi biaya transaksi termasuk provisi. Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

Pada saat penandatanganan perjanjian Kredit dengan debitur, BPR mengakui sebagai "kewajiban komitmen fasilitas Kredit yang diberikan kepada debitur" sebesar Plafon Kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan Kredit yang disepakati BPR dengan debitur, kecuali untuk penerusan Kredit. Jumlah kewajiban komitmen fasilitas Kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu Kredit sesuai jenis Kreditnya,

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e) Kredit yang Diberikan (*Lanjutan*)

Kredit disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Kredit sindikasi disajikan berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung BPR, termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud. Kredit kelolaan disajikan pada pos "Kredit yang Diberikan" berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung BPR termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud.

Pendapatan bunga dari Kredit (yang diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang pada saat pengakuan awal Kredit atau pada saat penyesuaian suku bunga Kredit) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan sebagai tagihan bunga Kredit atau pendapatan bunga Kredit yang akan diterima.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Selisih kurang antara perubahan estimasi arus kas atas Restrukturisasi Kredit dibandingkan dengan nilai tercatat diperhitungkan sebagai kerugian kredit.

Kredit restrukturisasi disajikan menjadi bagian dari Kredit.

Penghapusbukuan Kredit (hapus buku) adalah tindakan administratif BPR untuk memindahkan nilai yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan tanpa mengurangi hak tagih BPR kepada debitur secara kontrak.

Pada saat kredit dihapus buku, BPR telah membentuk CKPN sebesar 100%.

Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat Kredit dengan menjurnal balik CKPN – Kredit yang diberikan. Kredit yang dihapus buku disajikan dalam Rekening Administratif. Setoran yang diterima dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku diakui sebagai Pendapatan Hapus Buku (Pendapatan Operasional Lainnya).

f) Penyertaan Modal

Penyertaan Modal adalah penanaman dana BPR dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar dan SAK EP Bab 14 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi.

BPR mencatat seluruh investasi pada entitas asosiasi menggunakan salah satu metode yaitu metode biaya atau metode ekuitas.

Penghasilan dividen dari investasi pada entitas asosiasi diakui pada saat hak grup untuk menerima pembayaran telah ditetapkan. Penghasilan dividen termasuk dalam penghasilan lain.

BPR mengklasifikasikan investasi pada entitas asosiasi sebagai aset tidak lancar. (Hal ini mengacu SAK EP paragraf 14.11)

g) Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang Diambil Alih selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

g) Agunan Yang Diambil Alih (*Lanjutan*)

Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan. Nilai Wajar adalah suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan, antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Nilai Tercatat adalah nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi cadangan rugi penurunan nilai.

AYDA yang dicatat dalam laporan posisi keuangan hanya yang berasal dari penyelesaian kredit melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. BPR memperhitungkan AYDA yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sesuai dengan POJK mengenai kualitas aset BPR.

Pada saat pengakuan awal, AYDA dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual yaitu

maksimum sebesar kewajiban debitur. BPR tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. Setelah pengakuan awal, AYDA dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Apabila AYDA mengalami penurunan nilai, maka BPR mengakui rugi penurunan nilai tersebut.

Apabila AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, maka BPR mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.

AYDA tidak dilakukan depresiasi.

Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat AYDA dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian operasional.

Hasil penjualan agunan yang dikuasai diakui sebagai pengurang tagihan yang terkait dengan kredit.

Biaya transaksi dalam proses pengurusan AYDA dapat dikapitalisasi sepanjang nilai AYDA lebih besar dibandingkan nilai tercatat kredit setelah ditambah kapitalisasi biaya transaksi.

AYDA disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar mana yang lebih rendah, antara: nilai tercatat kredit; atau nilai wajar setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual.

h) Aset Tetap

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.2). Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 17 tentang Aset Tetap, SAK EP Bab 20 tentang Sewa dan SAK EP Bab 27 tentang Penurunan Nilai Aset.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sesuai PMK No. 72 Tahun 2023.

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tetap tersedia untuk digunakan dan penyusutannya dihentikan ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

i) Properti Terbengkalai

Properti Terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan operasional BPR. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR). Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 16 tentang Properti Investasi.

j) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 18.2).

Bab ini hanya diterapkan untuk akuntansi seluruh aset takberwujud selain goodwill.

Pengakuan awal aset takberwujud diakui sebesar biaya perolehan.

BPR mengukur aset tak berwujud pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tak berwujud diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya dan diakui sebagai beban setiap periode dengan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sesuai PMK No. 72 Tahun 2023.

Penurunan nilai aset tak berwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya.

k) Aset lainnya

Aset Lainnya adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Komponen aset lainnya, antara lain:

Pajak dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka, Mata uang kertas dan logam yang ditarik, Piutang dari perusahaan asuransi, Aset Pajak Tangguhan, Aset Keuangan Lainnya, Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima, Lainnya. Aset lainnya disajikan secara gabungan, kecuali komponennya memiliki nilai yang material, maka komponen tersebut disajikan tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

l) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar.

CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

Pada setiap akhir periode pelaporan, BPR menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.21).

Alur pembentukan CKPN sebagai berikut:

Langkah Pertama: Penilaian Pemenuhan Kriteria Aset Baik

- BPR melakukan penilaian apakah aset keuangan memenuhi kriteria aset baik. Kriteria aset baik sebagai berikut:

- Aset keuangan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia; aset keuangan dijamin oleh LPS; dan/atau aset keuangan tidak memiliki tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari dan tidak pernah dilakukan restrukturisasi. Dalam hal BPR melakukan perpanjangan kredit tanpa melihat kemampuan membayar debitur, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa kredit dimaksud tidak tergolong aset baik.

- Apabila aset keuangan memenuhi kriteria aset baik, BPR dapat tidak membentuk CKPN atas aset keuangan tersebut; aset keuangan tidak memenuhi kriteria aset baik, BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan (Langkah Kedua).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

I) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (*Lanjutan*)

Langkah Kedua: Penilaian Signifikansi

- BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik. Apabila aset keuangan signifikan, BPR melakukan penilaian terhadap aset keuangan tersebut secara individual (langkah ketiga); aset keuangan tidak signifikan, BPR membentuk CKPN secara kolektif.

Langkah Ketiga: Penilaian Individu Bukti Objektif Penurunan

- BPR melakukan penilaian secara individual terhadap aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik dan signifikan. Penilaian dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan. Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN individual; tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN kolektif.

Periode evaluasi penurunan nilai, bahwa setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, BPR mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai. Dalam hal BPR melakukan evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai sebelum tanggal evaluasi berikutnya, maka BPR mengestimasi kembali arus kas masa datang dan CKPN untuk kredit tersebut.

Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut, bahwa BPR melakukan konsolidasi dengan kepemilikan yang sama; BPR melakukan akuisisi dan/atau penggabungan usaha; dan/atau BPR mengganti aplikasi inti perbankan atau sistem pencatatan transaksi, yang menyebabkan BPR belum dapat menyediakan data untuk perhitungan CKPN kolektif maka pembentukan CKPN kolektif dapat menggunakan *peer group* data sampai dengan BPR memiliki data historis untuk perhitungan CKPN kolektif minimal 2 (dua) tahun periode bisnis normal.

Sesuai kondisi BPR saat ini, bahwa kebijakan metode perhitungan CKPN PT. Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda) No. 004/Dir/BPR Bintan/0125 Tentang Penentuan Ketentuan Sesuai SAK EP.

2) Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BPR. Penyelesaian kewajiban kini biasanya melibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.20, paragraf 2.21, dan lampiran B).

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan ketika:

- BPR memiliki kewajiban pada akhir periode pelaporan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu;
- Kemungkinan besar BPR akan menyelesaikan liabilitas tersebut dengan menyerahkan asetnya; dan
- Nilai liabilitas dapat diukur secara andal.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a) Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Simpanan merupakan liabilitas keuangan. Pengakuan awal sebesar nilai sekarang kas yang disampaikan ke BPR dikurangi biaya transaksi. Pengukuran selanjutnya menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Jika tidak terdapat biaya transaksi, nilai pada umumnya sama dengan jumlah kas yang akan dibayarkan dan tidak didiskontokan.

Bentuk-bentuk simpanan berupa:

- Tabungan adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung. Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan. Dalam hal terdapat amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada tabungan maka diakui sebagai beban bunga. Perhitungan beban bunga menggunakan suku bunga efektif. Tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.
- Deposito adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan BPR. Deposito yang dimaksud adalah deposito yang berjangka waktu. Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Setoran deposito diakui pada saat uang diterima. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito. Amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada deposito diakui sebagai beban bunga. Deposito disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban. Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.
- Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

b) Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah liabilitas BPR berupa tabungan dan deposito dari bank lain di Indonesia. Simpanan dari bank lain berupa tabungan dan deposito. Simpanan dari bank lain tidak termasuk pinjaman dari bank lain yang akan dicatat pada pos pinjaman yang diterima.

Tabungan dari bank lain, bahwa transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank lain. Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan. Tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan.

Deposito dari bank lain, bahwa transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Setoran deposito diakui pada saat uang diterima. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito. Deposito dari bank lain disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban. Kewajiban bunga deposito yang belum atau yang sudah jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c) Liabilitas Segera

Liabilitas segera adalah liabilitas BPR yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Liabilitas segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPR baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lain. Tidak termasuk dalam liabilitas segera adalah Jenis liabilitas segera antara lain: penutupan rekening deposito jatuh tempo; titipan nasabah; selisih lebih hasil penjualan agunan milik nasabah; dividen yang belum dibayarkan; liabilitas kepada pemerintah yang harus dibayar; sanksi liabilitas membayar kepada otoritas yang belum dibayarkan; gaji/honor/upah yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan. Komponen-komponen tersebut apabila jumlahnya material dikelompokkan dalam pos tersendiri.

Transaksi liabilitas segera diakui pada saat liabilitas telah jatuh tempo; atau liabilitas menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak. Liabilitas segera dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

d) Utang

- Utang Bunga

Utang bunga merupakan seluruh liabilitas BPR berupa liabilitas bunga kepada nasabah yang belum dibayarkan dari simpanan berupa tabungan maupun deposito dari pihak ketiga bukan bank dan dari bank lain, pinjaman yang diterima dari bank, serta utang bunga lain.

Termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti pinjaman yang diterima, dan pinjaman subordinasi. Utang bunga antara lain terdiri dari Liabilitas bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga). Bunga deposito yang telah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah. Bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil.

Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo. Penyajian Utang bunga disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

- Utang Pajak

Utang pajak adalah liabilitas pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR.

Dasar Pengaturan Utang Pajak ada pada SAK EP Bab 29 tentang Pajak Penghasilan dan juga PA BPR Bab XXIV tentang Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan.

Utang pajak mencakup utang pajak atas PPh Pasal 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhir masa pajak tahunan, yaitu selisih kurang kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan PPh Pasal 25 (angsuran pajak atau pajak dibayar di muka); dan/atau utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak.

Utang Pajak diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke kas negara. Penyajian Utang Pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e) Pinjaman

Pinjaman yang diterima adalah pinjaman yang diterima dari bank, Bank Indonesia dan/atau pihak ketiga bukan bank dengan kewajiban pembayaran kembali berdasarkan persyaratan perjanjian utang piutang. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat junior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal.

Pengukuran awal yaitu pinjaman diakui sebesar nilai sekarang kas terutang (sebagai contoh, termasuk pembayaran bunga dan pelunasan pokok). (Hal ini mengacu pada SAK EP Paragraf 11.13). Pengukuran selanjutnya pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pinjaman diterima dapat berasal dari bank umum, BPR lain, Bank Indonesia, atau pihak lain. Pinjaman diterima yang berasal dari Bank Indonesia berupa fasilitas pendanaan jangka pendek untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh BPR. Jenis pinjaman yang diterima antara lain: pinjaman bilateral; pinjaman sindikasi; pinjaman subordinasi; dan pinjaman khusus yang diterima dari lembaga pengayom maupun pinjaman dalam rangka linkage. Dalam ketentuan permodalan, pinjaman subordinasi masuk sebagai pinjaman dengan persyaratan tertentu sebagaimana POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Pinjaman yang diterima tidak termasuk: setoran keikutsertaan bank lain (bank peserta) dalam kredit sindikasi (pembiayaan bersama); atau dana yang diterima dalam rangka penerusan kredit (*channeling*).

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman, dikurangi bunga dibayar di muka jika ada (diskonto). Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan pinjaman dan diskonto diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui sebagai beban bunga. Bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai utang bunga. Penyajian Pinjaman yang diterima disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan serta biaya transaksi dan diskonto yang belum diamortisasi. Bunga yang masih harus dibayar disajikan dalam pos utang bunga. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik oleh BPR disajikan sebagai tagihan komitmen pada pos fasilitas pinjaman diterima yang belum ditarik. Penempatan BPR berupa giro pada bank umum yang bersaldo kredit (*overdraft*) disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pinjaman diterima.

f) Dana Setoran Modal-Liabilitas

Dana Setoran Modal (DSM) – Liabilitas adalah dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk penambahan modal, namun belum memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DSM – Liabilitas tidak memenuhi kriteria instrumen ekuitas karena masih terdapat unsur ketidakpastian di mana BPR tetap memiliki liabilitas kontraktual sehingga harus mengembalikan dana tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan untuk diakui sebagai modal disetor sesuai dengan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat. Dana setoran modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penyeter. Dana setoran modal yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan bagian dari ekuitas BPR.

Dana setoran modal yang diterima diakui sebagai DSM - Liabilitas. DSM - Liabilitas yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku diakui sebagai DSM - Ekuitas. Penyajian DSM – Liabilitas disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

g) Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)b. Liabilitas imbalan kerja adalah liabilitas yang timbul dari imbalan kerja.

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari: imbalan kerja jangka pendek; imbalan pascakerja; imbalan kerja jangka panjang lainnya; dan pesangon. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek: Secara umum diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto (*undiscounted amount*). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.5)

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah terdiskonto (*discounted amount*).

Khusus untuk liabilitas imbalan pascakerja program imbalan pastidan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya, BPR mengukur liabilitas pada total neto dari jumlah nilai kini liabilitas imbalan, dikurangi nilai wajar aset program (jika ada), pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.15 dan 28.30).

Khusus untuk pesangon, BPR mengakui pesangon sebagai beban dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pesangon tidak memberikan manfaat ekonomik kepada BPR di masa depan. Pesangon diakui sebagai liabilitas dan beban hanya ketika BPR menunjukkan komitmennya untuk melakukan pemberhentian kontrak kerja sebelum tanggal pensiun normal, yang ditunjukkan dengan rencana formal terperinci untuk menghentikan pekerja dan tidak terdapat kemungkinan yang realistis untuk membatalkan rencana tersebut; atau memberikan pesangon sebagai hasil dari penawaran yang dilakukan untuk mendorong pengurangan tenaga kerja secara sukarela. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.34 dan 28.35)2). BPR mengukur pesangon pada estimasi terbaik dari pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban. Jika pesangon diberikan untuk mendorong pengurangan tenaga kerja secara sukarela, pengukuran pesangon didasarkan pada jumlah pekerja yang diperkirakan akan menerima tawaran tersebut. Jika pesangon jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, pesangon diukur pada nilai sekarang terdiskonto. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.36 dan 28.37).

Penyajian Liabilitas imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos Liabilitas segera pada laporan posisi keuangan. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos liabilitas lainnya pada laporan posisi keuangan.

h) Liabilitas Lainnya

Liabilitas lainnya merupakan pos yang mencakup liabilitas BPR yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilitas yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Termasuk dalam liabilitas lainnya antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas lainnya diakui dalam hal BPR menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut dan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Penyajian Liabilitas lainnya disajikan dalam pos Liabilitas lain-lain pada laporan posisi keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya (*substance over form*). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3 dan 22.4).

a) Modal

Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar.

Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif diterima BPR.

Agio yaitu selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Modal sumbangan yaitu modal yang diterima BPR yang berasal dari sumbangan dalam bentuk dana atau aset lainnya.

b) DSM (Dana Setoran Modal) Ekuitas

DSM – Ekuitas yaitu dana yang telah disetor secara riil untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengankelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggotamaupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. (Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Perlakuan terhadap modal dilakukan sesuai ketentuan permodalan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang terkait perseroan terbatas, Undang-Undang terkait koperasi, POJK mengenai BPR, dan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

Modal disetor diakui pada saat BPR menerima setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas untuk selanjutnya diukur pada nilai wajar yang telah dikurangi biaya transaksi, jika ada. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.7 dan 22.8).

c) Saldo Laba

Saldo laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap (yang telah masuk sebagai bagian saldo laba).

Saldo laba umumnya dikelompokkan menjadi:

1. Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.
2. Cadangan tujuan yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS.
3. Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
 - a) laba tahun lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
 - b) laba tahun berjalan.

Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan pembagian dividen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

g. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

1) Penghasilan dan Beban

Penghasilan diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi peningkatan manfaat ekonomik masa depan terkait peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.41).

Penghasilan terdiri dari:

a) Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga, yaitu pendapatan dari penanaman dana BPR dalam bentuk aset produktif; dan pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari perjanjian kredit diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

Pendapatan Bunga terdiri dari:

- Pendapatan bunga kontraktual, yaitu pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan perjanjian dengan pihak lain atas surat berharga, penempatan pada bank lain, atau kredit yang diberikan (tidak termasuk amortisasi provisi atau biaya transaksi);

- Provisi kredit, yaitu pendapatan yang diterima BPR atas

Provisi diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi provisi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga.

Amortisasi provisi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing.

Pada saat kredit non-performing, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi provisi.

- Biaya transaksi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan penempatan sertifikat Bank Indonesia, penempatan pada bank lain serta kredit yang diberikan. Biaya transaksi mencakup semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit; dan

Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi biaya transaksi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.

Amortisasi Biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing. Pada saat kredit non-performing, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi biaya transaksi.

- Koreksi pendapatan bunga, yaitu koreksi pendapatan bunga akrual atas aset produktif yang mengalami penurunan kualitas atau penurunan nilai, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a) Pendapatan Operasional (*Lanjutan*)

Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sebagaimana diatur dalam

ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat. Bentuk pendapatan lainnya antara lain:

- Pendapatan jasa transaksi (seperti payment point
- Keuntungan dari penjualan valuta asing;
- Keuntungan penjualan surat berharga;
- Penerimaan aset produktif yang dihapus buku;
- Pemulihan CKPN aset keuangan;
- Dividen;
- Keuntungan dari penyertaan dengan equity method;
- Keuntungan penjualan AYDA;
- Pendapatan ganti rugi asuransi; dan
- Pemulihan penurunan nilai AYDA.

Pendapatan lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

b) Beban Operasional

Beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan usaha utama BPR.

Beban diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi penurunan manfaat ekonomik masa depan terkait penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.42).

Beban operasional diakui secara akrual, yaitu dampak daritransaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

Beban Operasional terdiri dari:

- Beban Bunga

Beban bunga, yaitu beban bunga atas kegiatan penghimpunan dana atau penerimaan pinjaman BPR, seperti tabungan atau deposito, pinjaman dari Bank Indonesia atau bank lain. Beban bunga termasuk amortisasi biaya transaksi dan provisi pinjaman yang diterima serta amortisasi biaya promosi yang dapat diatribusikan secara langsung pada rekening tabungan atau deposito. Beban bunga antar kantor tidak dilaporkan pada pos ini tetapi dilaporkan pada pos beban non operasional sesuai ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat;

- Beban kerugian restrukturisasi kredit

Beban kerugian restrukturisasi kredit, yaitu amortisasi cadangan kerugian yang timbul atas penurunan nilai kredit akibat restrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kelebihan CKPN aset keuangan karena perbaikan kualitas kredit dalam rangka restrukturisasi;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b) Beban Operasional (Lanjutan)

- Beban kerugian penurunan nilai

Beban kerugian penurunan nilai, yaitu CKPN aset produktif antara lain berupa kredit yang diberikan, surat berharga yang dimiliki, dan penempatan pada bank lain. Detil mengenai kerugian penurunan nilai dapat merujuk standar akuntansi keuangan mengenai instrumen dasar. Pembentukan beban kerugian penurunan nilai sebesar nilai tercatat kredit yang diberikan tidak semata merupakan penghentian pengakuan karena BPR masih memiliki hak kontraktual atas penerimaan arus kas mendatang yang berasal dari kredit yang diberikan; Beban kerugian penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan, BPR mengakui dan mengukur berdasarkan bukti objektif. Jika pada periode berikutnya, jumlah beban kerugian penurunan nilai menurun, maka BPR menyajikan jumlah perbaikan pada pemulihan CKPN pada pendapatan operasional lainnya.

- Beban pemasaran

Beban pemasaran, yaitu biaya yang berkaitan dengan promosi produk perbankan BPR antara lain biaya edukasi terhadap masyarakat tentang produk perbankan BPR, biaya pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan langsung pada rekening nasabah, dan biaya iklan untuk promosi;

- Beban penelitian dan pengembangan

Beban penelitian dan pengembangan, yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR. Termasuk pada pos ini yaitu: (1) biaya perjalanan dan akomodasi terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR, (2) biaya penelitian dan pengembangan untuk pendirian dan pembukaan kantor cabang BPR, dan (3) beban pengeluaran yang terjadi secara internal pada suatu item aset tak berwujud;

- Beban administrasi dan umum

Beban administrasi dan umum, termasuk beban tenaga kerja, beban pendidikan & pelatihan, beban sewa, beban penyusutan/penghapusan atas aset tetap & inventaris, beban amortisasi aset tak berwujud, beban premi asuransi, beban pemeliharaan dan perbaikan, beban barang & jasa, beban penyelenggaraan, teknologi informasi, kerugian terkait risiko operasional, dan pajak-pajak;

- Beban lainnya

Beban lainnya, yaitu beban operasional lainnya termasuk kerugian penjualan valuta asing, kerugian penjualan surat berharga, kerugian dari penyertaan dengan equity method, kerugian penjualan AYDA, kerugian penurunan nilai AYDA, dan biaya pungutan OJK.

Beban - beban lain seperti beban pemasaran, beban penelitian dan pengembangan, dan beban administrasi dan umum diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

2) Pendapatan dan Beban Non Operasional

a) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non operasional merupakan semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Non operasional diakui sebesar jumlah yang menjadi hak BPR. BPR mengakui pendapatan Non operasional menggunakan dasar akuntansi akrual, yaitu diakui ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk akun tersebut.

Pendapatan Non Operasional terdiri dari:

- Keuntungan penjualan, yaitu keuntungan karena penjualan aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Pemulihan penurunan nilai, termasuk penurunan nilai wajar atas aset tetap dan inventaris milik BPR yang sebelumnya telah mengalami penurunan nilai;
- Bunga antar kantor, yaitu pendapatan bunga yang berasal daritransaksi antarkantor. Pelaporan pendapatan bungaantarkantor untuk laporan perkantor dilaporkan secara tidaksaling hapus dengan beban bunga antarkantor (*gross*), sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara salinghapus (*offsetting/net*);
- Selisih kurs, yaitu keuntungan selisih kurs berupa selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya;
- Pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga yang tidak dapat dikelompokkan seperti di atas. Termasuk pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus tagih; sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

b) Beban Non Operasional

Beban Non operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

Beban non operasional diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Beban Non Operasional terdiri dari:

- Kerugian penjualan/kehilangan, yaitu kerugian karena penjualan atau kehilangan aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Kerugian penurunan nilai, yaitu kerugian atas penurunan nilai wajar aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Bunga antar kantor, yaitu beban bunga atas dana yang berasal dari transaksi antar kantor. Pelaporan beban bungaantarkantor untuk keperluan laporan keuangan bertujuan umum secara gabungan disajikan secara saling hapus(*offsetting/net*);
- Selisih kurs, yaitu kerugian selisih kurs berupa selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya; dan
- Beban lainnya, termasuk sanksi administratif berupa denda karena suatu pelanggaran dan sumbangan yang diberikan BPR.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan

a) Pajak Kini

Pajak kini adalah pajak penghasilan terutang (dapat dipulihkan) terkait dengan laba kena pajak (rugi pajak) untuk periode berjalan atau periode lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)

Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi BPR sebagai bagian dari biaya operasional.

Pengakuan ini harus dilakukan pada periode pelaporan yang sesuai dengan prinsip akrual, yaitu beban pajak harus diakui pada saat pendapat diperoleh atau biaya terjadi, bukan pada saat pembayaran dilakukan.

Beban pajak penghasilan diukur berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada periode pelaporan yang bersangkutan. Tarif pajak yang digunakan dapat berbeda tergantung pada jenis pendapatan atau pengeluaran, serta peraturan pajak yang berlaku.

b) Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah pajak penghasilan terutang atau dapat dipulihkan pada periode mendatang, umumnya sebagai hasil dari BPR memulihkan atau menyelesaikan aset dan liabilitas pada jumlah tercatat kini, dan dampak pajak dari akumulasi rugi pajak kini belum dikompensasi dan kredit pajak kini belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)

Aset pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporer dapat dikurangkan di masa depan. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Aset pajak tangguhan juga diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.12 dan 29.21)

Liabilitas pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporer kena pajak.

Liabilitas dan aset pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

4) Laporan Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain adalah item penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi yang disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan.

Penghasilan komprehensif lain timbul dari poin dalam SAK EP Bab 5 Paragraf 5.4 (b). Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasi aset tetap. Surplus revaluasi aset tetap tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasi aset tetap bila BPR memilih kebijakan akuntansi revaluasi untuk aset tetapnya (lihat bab IX tentang Aset Tetap dan Inventaris). Surplus revaluasi aset tetap tidak di reklasifikasikan ke laba rugi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

h. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyediakan informasi perubahan kas dan setara kas BPR untuk periode pelaporan. Laporan arus kas menunjukkan secara terpisah penerimaan dan pengeluaran kas BPR dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.1)

Aktivitas operasi adalah aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bagi BPR dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang timbul dari perubahan dalam ukuran dan komposisi ekuitas dan pinjaman BPR yang dikontribusikan.

BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung, dengan metode ini pos-pos utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.7)

a. Kas terdiri atas:

- 1) kas dalam rupiah dan kas dalam valuta asing;
- 2) rekening giro pada bank lain;
- 3) tabungan pada bank atau BPR lain.

b. Setara kas, antara lain:

- 1) surat berharga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- 2) deposito dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

i. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk suatu periode, item penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, dampak perubahan dalam kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut dan (tergantung pada format laporan dari perubahan ekuitas yang dipilih oleh BPR) jumlah transaksi dengan pemilik yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemilik selama periode tersebut.

j. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BPR. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BPR, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

k. Instrumen Keuangan

- Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada BPR dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lainnya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.3).
- BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas keuangan sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya dan tidak hanya dari bentuk hukumnya (substance over form). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A).
- Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan jika BPR harus menyelesaikan kewajiban kontraktualnya melalui penyerahan kas atau aset lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

i. Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode pengalokasian penghasilan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama umur instrumen keuangan ke jumlah tercatat aset atau liabilitas keuangan tersebut. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.16).

m. Pengukuran Aset Non Keuangan dan Liabilitas Non Keuangan

Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46).

Selanjutnya aset dan liabilitas diukur dengan dasar pengukuran lainnya sebagai berikut:

- Semisal Aset Tetap yaitu dengan model biaya, diukur pada yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai dengan jumlah terpulihkan; atau Model revaluasi, diukur pada yang lebih rendah antara jumlah revaluasi dan jumlah terpulihkan.
- BPR mengakui kerugian penurunan nilai terkait aset nonkeuangan yang digunakan atau dikuasai untuk dijual, sebagai contoh aset yang diambil alih.
- SAK EP mengizinkan atau mensyaratkan pengukuran pada nilai wajar untuk: investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang diukur BPR pada nilai wajar; properti investasi yang diukur BPR pada nilai wajar; dan aset tetap yang diukur BPR dengan model revaluasi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.50).
- Kebanyakan liabilitas selain liabilitas keuangan diukur pada estimasi terbaik atas jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.51).

n. Pengukuran Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas keuangan pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46) Selanjutnya aset dan liabilitas diukur dengan dasar pengukuran lainnya sebagai berikut:

- BPR mengukur aset keuangan dasar dan liabilitas keuangan dasar pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*) dikurangi penurunan nilai. Pengukuran ini dikecualikan untuk: investasi dalam saham preferen yang tidak dapat dikonversi; dan saham biasa atau saham preferen tanpa opsi jual yang diperdagangkan secara publik atau yang nilai wajarnya dapat diukur dengan andal tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Investasi dan saham di atas diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.47).
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali disyaratkan lain oleh SAK EP. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.48)
- Biaya perolehan diamortisasi aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah nilai bersih dari: jumlah saat pengakuan awal; dikurangi setiap pelunasan pokok; ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan dikurangi penurunan nilai (untuk aset keuangan). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.15).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

o. Saling Hapus

- BPR tidak diperbolehkan melakukan saling hapus aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban. Saling hapus hanya diperbolehkan dalam rangka penyajian untuk transaksi yang memiliki sifat yang sama, sebagai contoh keuntungan selisih kurs dan kerugian selisih kurs.

- Pengukuran aset secara neto dengan nilai penyisihan bukan merupakan saling hapus.

- Jika aktivitas operasi normal BPR tidak mencakup pembelian atau penjualan aset tidak lancar, maka BPR melaporkan Keuntungan dan kerugian pelepasan aset tersebut dengan cara mengurangi hasil pelepasan dengan jumlah tercatat asetnya dan beban penjualan terkait.

(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.52)

p. Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Bank telah menerapkan SAK Entitas Privat (SAK EP) sebagai kerangka pelaporan keuangan, menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Transisi ini merupakan perubahan kerangka pelaporan keuangan yang signifikan. SAK EP (Entitas Privat) menggantikan SAK ETAP dengan beberapa penyesuaian pada instrumen keuangan.

PT. Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Perseroda) menggunakan prinsip penyesuaian tersebut dengan metode prospektif yaitu dari dimulainya periode praktis paling awal. Oleh karena itu, entitas mengabaikan porsi penyesuaian kumulatif atas aset, liabilitas, dan ekuitas yang timbul sebelum tanggal berlakunya SAK EP, sesuai Surat Keputusan Direksi No. . 004/Dir/BPR Bintan/01255.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025 (Audited)	2024 (Audited)
3. Kas		
Akun ini terdiri dari		
Kas	1.144.317.800	1.458.696.000
Jumlah Kas	1.144.317.800	1.458.696.000
4. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima		
Akun ini terdiri dari:		
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	1.483.544.922	1.321.424.693
Jumlah Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	1.483.544.922	1.321.424.693
5. Penempatan pada Bank Lain		
Akun ini terdiri dari:		
Giro		
PT Bank Riau Kepri	2.657.235.826	2.986.155.693
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	460.701.341	2.154.311.095
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	394.864.940	1.008.974.587
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	437.989.947	213.113.759
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	3.450.001	3.450.001
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	1.000.000	1.000.000
Jumlah Giro	3.955.242.055	6.367.005.135
Tabungan		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	12.650.553.576	2.745.246.136
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	708.333.942	2.652.681.960
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	139.846.200	2.051.947.671
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	3.908.592.864	684.882.657
PT BPR Universal	866.426.309	183.128.873
Jumlah Tabungan	18.273.752.891	8.317.887.297
Deposito		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	-	3.000.000.000
PT Bank Riau Kepri Syariah	-	2.000.000.000
PD BPR Rokan Hulu	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Pekanbaru	1.800.000.000	2.000.000.000
PD BPR Bestari	1.500.000.000	2.000.000.000
PD BPR Gemilang	1.500.000.000	2.000.000.000
PT BPR Bank Jombang	-	2.000.000.000
PT BPR Syariah Jam Gadang	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Asia Sejahtera	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Dana Mulia Sejahtera	1.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Pundi Masyarakat	500.000.000	2.000.000.000
PT BPR Ceper Klaten	2.000.000.000	2.000.000.000
PD Bank Rohil	-	2.000.000.000
PT BPR Dana Amanah	500.000.000	2.000.000.000
PD BPR Tuah Karimun	-	2.000.000.000
PT BPR Dana Mandiri Bogor	-	1.500.000.000
PT BPR Putra Batam	-	1.500.000.000
PT BPR Karimun	-	1.000.000.000
PT BPR Kepri Bintan	-	1.000.000.000
PT BPR Dana Prima Mandiri	2.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Fianka Rezalina Fatma	-	1.000.000.000
Perumda BPR Garut	-	1.000.000.000
PD BPR LPK Parung Panjang	1.500.000.000	1.000.000.000
PT BPR Kredit Mandiri Indonesia	1.000.000.000	1.000.000.000

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Penempatan pada Bank Lain (Lanjutan)

Deposito (Lanjutan)

PT BPR Syariah Vitka Central	-	1.000.000.000
PT BPR Palembang	-	1.000.000.000
Perumda BPR Indra Arta	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Nusumma Jatim	-	1.000.000.000
PT BPR Central Sejahtera	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Baturaja	-	1.000.000.000
PT BPR Dana Bintang Sejahtera	-	1.000.000.000
PD BPR Bank Daerah Bojonegoro	-	1.000.000.000
PT BPR Duta Kepulauan Riau	1.500.000.000	1.000.000.000
PD BPR Bahteramas Kota Kendari	-	1.000.000.000
PT BPR Bontang Sejahtera	-	1.000.000.000
PT BPR Syariah PNM Mentari	2.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Majatama	-	1.000.000.000
PT BPR Syariah Syarikat Madani	2.000.000.000	600.000.000
PT BPR Rasyid	-	500.000.000
PT BPR Dana Central Mulia	-	500.000.000
PT BPR Syariah Al-Madinah Tasikmalaya	500.000.000	500.000.000
PT BPR Sumber Dana Mas	-	500.000.000
PT BPR Buana Arta Mulia	1.000.000.000	500.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia	-	-
PD BPR Karimun	1.000.000.000	-
PT BPR Mega Mas Lestari	1.000.000.000	-
PT BPR Luna Sinar Indonesia	1.000.000.000	-
PT BPR Syariah Bogor Tegar Beriman	1.000.000.000	-
Jumlah Deposito	32.300.000.000	57.100.000.000
Jumlah Simpanan	54.528.994.947	71.784.892.432
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	-	(37.508.817)
Jumlah Penempatan pada Bank Lain	54.528.994.947	71.747.383.615

6. Kredit yang Diberikan

Akun ini terdiri dari:

Berdasarkan Kolektabilitas

Lancar	188.578.840.572	157.816.496.871
Dalam Perhatian Khusus	7.459.407.193	8.513.463.901
Kurang Lancar	881.688.835	1.418.380.879
Diragukan	229.972.295	3.284.939.656
Macet	10.839.511.420	5.719.683.546
Jumlah	207.989.420.315	176.752.964.853
Provisi dan biaya transaksi yang ditangguhkan - bersih	(1.558.946.905)	(1.486.747.389)
PPKA	-	(3.186.994.364)
CKPN Kredit	(3.748.207.164)	-
Jumlah Kredit Yang Diberikan-Netto	202.682.266.246	172.079.223.100

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. Aset Tetap dan Inventaris

Akun ini terdiri dari:

31 Desember 2025	Saldo Awal Rp.	Penambahan Rp.	Pengurangan Rp.	Saldo Akhir Rp.
Harga Perolehan:				
Gedung	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
Kendaraan	1.428.574.000	473.682.610	-	1.902.256.610
Inventaris kantor	2.974.760.762	165.479.624	-	3.140.240.386
Software	162.067.939	48.216.327	-	210.284.266
Jumlah Harga Perolehan	6.065.402.701	687.378.561	-	6.752.781.262
Akumulasi Penyusutan				
Gedung	825.000.000	75.000.000	-	900.000.000
Kendaraan	777.095.698	152.930.029	-	930.025.727
Inventaris kantor	2.574.951.245	161.456.840	-	2.736.408.085
Software	101.633.490	26.687.050	-	128.320.540
Jumlah Akm Penyusutan	4.177.046.943	389.386.869	-	4.694.754.352
Nila Buku Aset Tetap	1.888.355.758			2.058.026.910
31 Desember 2024	Saldo Awal Rp.	Penambahan Rp.	Pengurangan Rp.	Saldo Akhir Rp.
Harga Perolehan:				
Gedung	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
Kendaraan	1.310.651.000	367.923.000	250.000.000	1.428.574.000
Inventaris kantor	2.818.854.434	155.906.328	-	2.974.760.762
Software	93.000.000	69.067.939	-	162.067.939
Jumlah Harga Perolehan	5.722.505.434	592.897.267	250.000.000	6.065.402.701
Akumulasi Penyusutan				
Gedung	750.000.000	75.000.000	-	825.000.000
Kendaraan	957.132.239	69.963.459	250.000.000	777.095.698
Inventaris kantor	2.431.529.790	143.421.455	-	2.574.951.245
Software	93.000.000	8.633.490	-	101.633.490
Jumlah Akm Penyusutan	4.231.662.029	297.018.404	250.000.000	4.278.680.433
Nila Buku Aset Tetap	1.490.843.405			1.786.722.268

8. Agunan Yang Diambil Alih

Akun ini terdiri dari:

Agunan Yang Diambil Alih		8.436.359.940	8.636.459.940
Jumlah Agunan Yang Diambil Alih		8.436.359.940	8.636.459.940

9. Aset Lain-lain

Akun ini terdiri dari:

Biaya Dibayar Dimuka		260.428.554	510.132.509
Persediaan		1.607.721.989	184.126.405
Jumlah Aset Lain-lain		1.868.150.543	694.258.914

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. Kewajiban Segera Dibayar

Akun ini terdiri dari:

Cadangan pesangon dan lainnya	4.218.044.320	3.136.039.510
Asuransi	56.132.676	18.299.441
Biaya kredit	11.929.258	28.699.792
Titipan transfer bank lain	3.435.000	-
Lainnya	219.281.647	1.030.378.597

Jumlah Kewajiban Segera Dibayar

4.508.822.901 **4.213.417.340**

11. Utang Bunga

Akun ini terdiri dari:

Utang Bunga	453.955.647	545.033.764
-------------	-------------	-------------

Jumlah Utang Bunga

453.955.647 **545.033.764**

12. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

Pajak kini	114.620.875	125.895.618
Pajak penghasilan:		
PPh Pasal 4 Ayat (2)	83.333	99.825.024
PPh Pasal 21	80.024.555	79.798.639
PPh Pasal 23	976.604	692.602
PPh Pasal 25	90.727.969	-
PPh Pasal 29	273.800.958	30.986.287

Jumlah Utang Pajak

560.234.294 **337.198.170**

13. Simpanan Nasabah

Akun ini terdiri dari:

Tabungan:

Dana Bintan	46.027.147.545	41.860.585.154
Tabunganku	14.571.053.915	14.638.421.539
Dana Plus Perusahaan	13.665.352.141	13.525.221.233
Dana Pro	7.827.218.338	6.635.104.744
Simpanan pelajar	4.590.353.520	4.538.171.459
Dana Plus PDRS	193.611.615	4.490.513.252
Simpanan Arisan Masyarakat	4.955.841.000	3.095.838.000
Simpanan Masa Depan	2.914.840.062	2.613.553.110
Dana Prima	4.358.442.516	2.128.271.485
Berkah	1.604.546.365	1.544.768.951
Mikro Bangkit	1.285.809.140	1.342.449.208
B-Save	981.054.308	908.900.555
Dana Plus	327.625.736	324.067.227
Sejahtera Bintan	70.514.718	61.328.729
Masyarakat	13.012.315	14.952.501
Fintech P2P lending	-	-
Bintan Juara	5.893.170.700	-
Prima Flexy	721.956.980	-

Jumlah

110.001.550.914 **97.722.147.147**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. Simpanan Nasabah (Lanjutan)

Biaya Transaksi	(349.596.390)	(212.804.940)
Jumlah Tabungan	109.651.954.524	97.509.342.207
Deposito	93.404.402.068	95.963.800.115
Jumlah Deposito	93.404.402.068	95.963.800.115
Jumlah Simpanan	203.056.356.592	193.473.142.322

14. Simpanan Dari Bank Lain

Akun ini terdiri dari:

Tabungan	423.371	423.371
Deposito berjangka:	-	-
PT BPR Bank Jombang	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Buana Arta Mulia	-	2.000.000.000
PT BPR Dana Nagoya	1.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Majesty Golden Raya	-	2.000.000.000
PT BPR Nusumma Jatim	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Sejahtera Batam	500.000.000	2.000.000.000
PT BPR Central Kepri	-	1.000.000.000
PT BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia	-	1.000.000.000
PT BPR Natuna	-	1.000.000.000
PT BPR Putra Batam	500.000.000	500.000.000
PT BPR Dana Mandiri Bogor	-	-
PT BPR Delta Artha	1.000.000.000	-
PT BPR Kepri Bintan	1.000.000.000	-
PT BPR Kota Bogor	2.000.000.000	-
PT BPR Rokan Hilir	1.000.000.000	-
PT BPR Satya Mitra Andalan	2.000.000.000	-
PT BPR Dana Amanah	1.300.000.000	-
PT BPR Asli Dana Mandiri	2.000.000.000	-
PT BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri	1.000.000.000	-
PT BPR Dana Bintan Sejahtera	1.000.000.000	-
Jumlah Simpanan Dari Bank Lain	18.300.423.371	15.500.423.371

15. Modal

Akun ini terdiri dari:

Modal Dasar	50.000.000.000	20.000.000.000
Modal Belum Disetor	(30.000.000.000)	(30.000.000.000)
Jumlah Modal	20.000.000.000	20.000.000.000

16. Saldo Laba

Akun ini terdiri dari:

Modal Sumbangan	1.500.000.000	1.500.000.000
Cadangan Umum	9.963.563.752	9.567.337.375
Cadangan Tujuan	9.021.578.792	8.625.352.415
Saldo Laba	4.836.725.958	3.962.263.773
Jumlah Saldo Laba	25.321.868.502	23.654.953.563

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. Pendapatan Bunga

Akun ini terdiri dari:

Pendapatan Bunga Giro	53.013.691	49.162.232
Pendapatan Bunga Tabungan	116.505.989	100.877.168
Pendapatan Bunga Deposito	3.173.450.736	4.116.791.679
Pendapatan Bunga Kredit	22.452.830.038	19.197.198.363
Jumlah Pendapatan Bunga Kontraktual	25.795.800.455	23.464.029.442

Pendapatan Provisi dan Administrasi Kredit

Pendapatan Provisi	718.267.779	781.504.159
Pendapatan Adm Kredit	279.740.220	(170.006.835)
Jumlah Pendapatan Provisi dan Administrasi Kredit	998.007.999	611.497.323

Jumlah Pendapatan Bunga

26.793.808.454	24.075.526.766
-----------------------	-----------------------

18. Pendapatan Operasional Lainnya

Akun ini terdiri dari:

Denda deposito dan kredit	651.215.680	494.612.611
Administrasi tabungan	549.264.512	532.513.164
Lain-lain	76.352.614	567.776.584
Pemulihan penghapusan aset produktif	-	4.924.117.464
Penerimaan kembali aktiva	182.903.851	
Pendapatan Restruktur	91.261.796	
Pemulihan CKPN	314.259.101	
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	1.865.257.554	6.519.019.823

19. Beban Bunga

Akun ini terdiri dari:

Bunga Setoran Ke Bank Lain	531.489.720	-
Deposito berjangka	5.023.335.137	5.199.539.649
Tabungan	1.348.217.806	1.242.249.918
Lainnya pihak ketiga	420.833.911	-
Biaya transaksi	36.897.621	-
Biaya transaksi tabungan	236.664.151	-
Koreksi atas pendapatan bunga	28.160.310	-
Premi Asuransi	90.624.825	-
Lainnya	-	580.780.169
Jumlah Beban Bunga	7.716.223.481	7.022.569.736

20. Beban Penyisihan Kerugian

Akun ini terdiri dari:

Penempatan Pada Bank Lain	-	886.140.084
Kredit Yang Diberikan	-	4.703.127.265
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian	-	5.589.267.349

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. Beban Operasional Lainnya

Akun ini terdiri dari:

Beban Gaji dan Tunjangan

Gaji dan honorarium	7.083.784.528	6.885.967.951
Tunjangan hari raya dan bonus	2.059.524.484	1.679.837.943
Pendidikan	479.264.191	416.678.651
Lainnya	655.899.191	660.723.534
Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan	10.278.472.394	9.643.208.079

Beban Umum dan Administrasi

Keperluan kantor	1.237.190.039	1.006.743.047
Barang dan jasa pihak ketiga	635.419.151	574.155.537
Penyusutan	416.278.069	297.018.404
Perjalanan dinas	168.840.971	190.913.796
Sewa	175.983.738	187.345.359
Iklan dan promosi	175.113.001	167.721.301
Pemeliharaan dan perbaikan	143.575.730	160.033.907
Penagihan kredit	109.642.737	147.350.213
Asuransi	-	80.996.673
Pajak - pajak	40.651.142	55.064.092
Lainnya	441.100.742	297.246.070
Penelitian dan pengembangan	6.660.000	-
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	838.140.714	-
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	4.388.596.034	3.164.588.399

Jumlah Beban Operasional Lainnya

14.667.068.428 **12.807.796.478**

22. Pendapatan dan Beban Non Operasional

Pendapatan Non Operasional:

Lainnya	11.281.833	-
Jumlah Pendapatan Non Operasional	11.281.833	-

Beban Non Operasional

Kerugian penjualan/hapus buku lain	20.100.000	
Lainnya	116.459.672	(260.047.364)
Jumlah Beban Non Operasional	136.559.672	(260.047.364)

Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional

(125.277.839) **260.047.364**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. Taksiran Pajak Penghasilan

Peredaran Bruto		
Pendapatan Bunga	25.795.800.455	23.464.029.442
Pendapatan Provisi Dan Administrasi	998.007.999	611.497.323
Pendapatan Operasional Lainnya	1.865.257.554	6.519.019.823
Pendapatan Non-Operasional:	11.281.833	-
Peredaran Bruto	28.670.347.841	30.594.546.588
Laba Sebelum Pajak	6.150.496.260	4.914.865.662
Koreksi Fiskal:		
Provisi dan administrasi	216.047.688	71.060.489
Penyisihan penghapusan aset produktif	(37.331.187)	(11.844.120)
Biaya transaksi	-	(305.878.927)
Sumbangan	8.350.000	21.335.000
Iklan dan promosi	175.113.001	1.000.000
Representasi	2.567.000	-
Denda	2.000.000	-
Keperluan kantor	-	-
Lainnya	-	6.521.420
Total Koreksi Fiskal	366.746.502	(217.806.138)
Penghasilan Kena Pajak	6.517.242.763	4.697.059.524
Jumlah Laba (Rugi) Fiskal	6.517.242.763	4.697.059.524

Taksiran Pajak Penghasilan

Penghasilan Kena Pajak (PKP):		952.601.889
Peredaran bruto yang mendapat fasilitas (4.800.000.000 : Omset) x PKP x 11%	120.023.105	
Peredaran bruto yang tidak mendapat fasilitas ((Omset - 4.800.000.000) : Omset) x PKP x 22%	1.193.747.197	
Taksiran Pajak Penghasilan (Baru)	1.313.770.302	952.601.889
Taksiran Pajak Penghasilan (Lama)	1.039.969.344	952.601.889
Lebih (Kurang) Taksiran Pajak Penghasilan	(273.800.958)	-

PPH Pasal 25

Pembayaran pajak dimuka pasal 25	1.039.969.344	826.706.271
----------------------------------	---------------	-------------

Utang (Piutang) Pajak Psl 25

	273.800.958	125.895.618
--	--------------------	--------------------

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas pajak perusahaan dan tidak tertutup kemungkinan hasil pemeriksaan berbeda dengan saldo taksiran pajak tahun 2025 dan 2024 tersebut.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

1. Perkembangan Usaha

a. Total asset

Total aset Perumda BPR Bintang per 31 Desember 2025, mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut :

Total asset tahun 2025	272.201.661.307
Total asset tahun 2024	257.724.168.529
Kenaikan	14.477.492.778
Persentase Peningkatan	5,62%

b. Penghimpunan Dana

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun Perumda BPR Bintang per 31 Desember 2025, yaitu deposito dan tabungan dengan rincian sebagai berikut :

	Deposito	Tabungan
Dana yang dihimpun tahun 2025	93.404.402.068	109.651.954.524
Dana yang dihimpun tahun 2024	95.963.800.115	97.509.342.207
Peningkatan (Penurunan)	(2.559.398.047)	12.142.612.317
Persentase Peningkatan (penurunan)	-2,67%	12,45%

c. Pemberian kredit

Jumlah pinjaman yang diberikan Perumda BPR Bintang per 31 Desember 2025, mengalami penurunan, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman yang diberikan tahun 2025 (Bruto)	207.989.420.315
Pinjaman yang diberikan tahun 2024 (Bruto)	176.752.964.853
Peningkatan (Penurunan)	31.236.455.462
Persentase Peningkatan (penurunan)	17,67%

2. Permodalan

a. Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (Rincian Terlampir)

Bank akan selalu memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan termasuk dalam bidang permodalan sehingga apabila terdapat perubahan ketentuan dalam perbankan Indonesia, manajemen akan segera menyusun perencanaan untuk memenuhi ketentuan tersebut. Bilamana bank tidak memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mengambil tindakan yang memengaruhi operasi bank

b. Rasio Kecukupan Modal (Rincian Terlampir)

Bank diwajibkan memenuhi persyaratan rasio kewajiban penyediaan modal (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, yang mempertimbangkan secara kuantitatif seperti aset, kewajiban dan akun of balance sheet tertentu juga pertimbangan secara kualitatif tentang komponen dan resiko tertimbang.

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

3. Analisa Likuiditas

a. Cash Ratio

Alat Likuid

Kas	1.144.317.800
Penempatan pada bank lain (giro dan tabungan)	22.228.994.947
Jumlah	23.373.312.747

Hutang Lancar

Kewajiban segera dibayar	4.508.822.901
Tabungan	109.651.954.524
Deposito berjangka	93.404.402.068
Jumlah	207.565.179.493

Cash Ratio **11,26%**

b. Rasio total kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima (Loan to Debt Ratio)

Loan

Jumlah kredit yang diberikan 207.989.420.315

Debt

Simpanan pihak ketiga (non bank)	
Tabungan	109.651.954.524
Deposito berjangka	93.404.402.068
Jumlah	203.056.356.592

Loan to debt Ratio **102,43%**

4. a. Rasio Rentabilitas

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

Beban operasional (akhir tahun)	22.383.291.908
Pendapatan operasional (akhir tahun)	28.659.066.008
BOPO	78,10%

b. Batas maksimum pemberian kredit

Modal inti	39.610.830.217
Modal pelengkap	25.106.017
Jumlah Modal	39.635.936.234

Pihak terkait (10%) 3.963.593.623

Pihak tidak terkait (20%) 7.927.187.247

Penyertaan BPR dan BPRS Lain (30%) 11.890.780.870

c. Return On Aset (ROA)

Rata-Rata Aset (rerata dlm ribuan) 262.424.167.612

Laba Sebelum Pajak (rerata, dlm ribuan) 6.150.496.260

Return On Aset (ROA) **2,34%**

5. Aset Produktif (Rincian terlampir)

Tabel di bawah ini menunjukkan perhitungan kualitas aset produktif bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
PERHITUNGAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025

	Keterangan	31 Desember 2025				ATMR Rp
		Nominal Rp	CKPN	Nominal Stlh Dikurangi CKPN Khusus	Bobot Risiko %	
1	Kas	1.144.317.800		1.144.317.800	0%	-
2	Surat Berharga yang diterbitkan Bank Indonesia			-	0%	-
3	Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah			-	0%	-
4	Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah Daerah			-	0%	-
5	Kredit yang diberikan dengan agunan tunai sesuai POJK KA BPR, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki			-	0%	-
6	Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	8.696.788.494		8.696.788.494	0%	-
7	Properti Terbengkalai yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan			-		-
8	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan			-		-
9	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan tagihan lain kepadabank lain	54.528.994.947		54.528.994.947	20%	10.905.798.989
10	Kredit kepada atau bagian kredit yang dijamin oleh bank lain atau pemerintah daerah			-		-
11	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit			-		-
12	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebanidengan hak tanggungan atau fidusia	66.826.671.847		66.826.671.847	30%	20.048.001.554
13	Kredit kepada BUMN/BUMD			-		-
14	Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kreditnamun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluhpersen)			-		-
15	Bagian kredit yang dijamin asuransi kredit oleh perusahaan asuransi swasta denganpersyaratan tertentu			-		-
16	Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan	74.881.081.526		74.881.081.526	50%	37.440.540.763
17	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidakdibebani dengan hak	12.020.131.026		12.020.131.026	50%	6.010.065.513
18	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria	3.088.226.571		3.088.226.571	70%	2.161.758.600
19	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat,dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan	4.680.545.974		4.680.545.974	70% 70%	3.276.382.182
20	Penyertaan Modal			-		-
21	Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas	35.632.287.209		35.632.287.209	100%	35.632.287.209
22	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	10.860.476.162		10.860.476.162	100%	10.860.476.162
23	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud	2.058.026.910		2.058.026.910	100%	2.058.026.910
24	AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-		-	100%	-
25	Properti Terbengkalai yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan			-	100%	-
26	Aset lain, selain angka 1 s.d angka 25	3.151.595.465		3.151.595.465	100%	3.151.595.465
	JUMLAH ATMR	277.569.143.930	-	277.569.143.930		131.544.933.347

Manajemen BPR belum sepenuhnya menggunakan SE OJK Nomor 2/SEOJK.03/2025 dalam perhitungan ATMR nya, sehingga akan mempengaruhi perhitungan lain (PKMM, BMPK, dsb).

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Keterangan	31 Desember 2025	
	Jumlah Setiap komponen Rp	Jumlah Rp
A. MODAL		
1. Modal Inti		
1.1. Modal disetor	20.000.000.000	20.000.000.000
1.2. Agio	-	-
1.3. Disagio -/-	-	-
1.4. Modal Sumbangan	-	-
1.5. Dana setoran modal	1.500.000.000	1.500.000.000
1.6. Cadangan umum	9.963.563.752	9.963.563.752
1.7. Cadangan tujuan	9.021.578.792	9.021.578.792
1.8. Laba ditahan	-	-
1.9. Laba tahun-tahun lalu	-	-
1.10. Rugi tahun-tahun lalu -/-	-	-
1.11. Laba tahun berjalan	4.836.725.958	4.836.725.958
1.12. Rugi tahun berjalan -/-	-	-
1.13. Sub total	45.321.868.502	-
1.14. Goodwill		-
AYDA lebih dari setahun terdiri dari :		-
1 sampai 3 tahun	(2.193.197.908)	(328.979.686)
Lebih dari 3 tahun	(3.347.734.159)	(1.673.867.080)
Lebih dari 5 tahun	(3.095.527.873)	(3.095.527.873)
kekurangan PPKA -/-		(612.663.647)
1.15. Jumlah Modal Inti		39.610.830.217
2. Modal Pelengkap		
2.1. Cadangan revaluasi aktiva tetap	-	-
2.2. Penyisihan penghapusan aktiva produktif umum (maksimum 1,25% ATMR)	25.106.017	25.106.017
2.3. Modal kuasi/modal pinjaman	-	-
2.4. Pinjaman subordinasi (maksimum 50% dari modal inti)	-	-
2.5. Jumlah Modal Pelengkap	25.106.017	-
2.6. Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan (maksimum 100% dari modal inti)		25.106.017
3. Jumlah modal (1.13 + 2.6)		39.635.936.234
B. MODAL MINIMUM (12% X ATMR)	131.544.933.347	15.785.392.002
C. KELEBIHAN MODAL		23.850.544.231
D. RASIO MODAL = $\frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$		30,13%
E. RASIO MODAL INTI = $\frac{\text{Jumlah Modal Inti}}{\text{ATMR}} \times 100\%$		30,11%

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Keterangan	Lancar Rp	Dalam Perhatian Khusus - Rp	Kurang Lancar Rp	Diragukan Rp	Macet Rp	Jumlah Rp
1. Aktiva Produktif						
a. Kredit yang diberikan	188.578.840.572	7.459.407.193	881.688.835	229.972.295	10.839.511.420	207.989.420.315
b. Surat-surat berharga dijamin oleh LPS	-	-	-	-	-	-
c. Penempatan pada bank lain yang tidak dijamin LPS	-	-	-	-	-	-
Jumlah aktiva produktif	188.578.840.572	7.459.407.193	881.688.835	229.972.295	10.839.511.420	207.989.420.315
		0%	50%	75%	100%	
2. Jumlah aktiva produktif yang diklasifikasikan		-	440.844.418	172.479.221	10.839.511.420	11.452.835.058
3. Nilai agunan kredit		5.959.996.126	434.159.405	210.351.131	7.215.956.130	13.820.462.792
4. Kredit Back to Back						-
5. Dasar Perhitungan PPKAWD	188.578.840.572	1.499.411.067	447.529.430	19.621.164	3.623.555.290	194.168.957.523
6. Prosentase PPKAWD	0,50%	3%	10%	50%	100%	
7. Jumlah PPKAWD	25.106.017	44.982.332	44.752.943	9.810.582	3.623.555.290	3.748.207.164
8. Jumlah PPKAWD yang telah dibentuk						3.748.207.164
9. Jumlah lebih (kurang) pembentukan PPAP						-
10. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif (2:1) x 100%						5,51%
11. Rasio PPAP terhadap PPKAWD (8:7) x 100%						100,00%
12. Prosentase kolektibilitas Kredit	90,67%	3,59%	0,42%	0,11%	5,21%	100,00%
13. Rasio NPL						5,75%
			836.935.892	220.161.713	7.215.956.130	8.273.053.735
14. Rasio NPLs (Netto)						3,98%

LAMPIRAN

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN (PERSERODA)
JURNAL KOREKSI TAHUN 2025

INDEX	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1.	Taksiran Pajak Penghasilan Utang Pajak (PPH 29) <i>(Jurnal Koreksi atas perhitungan pajak)</i>	273.800.958	273.800.958
	JUMLAH	273.800.958	273.800.958

Bintan, 10 Maret 2026



Radhiah

Direktur Utama